

**RESISTENSI DEMOKRASI INDONESIA DALAM RUANG
CITIZEN JOURNALISM "KOMPASIANA"**



**Diajukan oleh:
Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M.
NIP:1968050820000031002**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
2015**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
INTISARI	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Signifikansi	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	6
F. Sistematika Laporan	12
BAB II : GLOBALISASI DAN DEMOKRASI	14
A. Globalisasi dan Demokrasi.....	14
B. Deregulasi Landscap Media.....	15
C. Komersialisasi Media Pemerintah	16
D. Friksi Konsep Modalitas dan Konsep Pengendalian dalam Hegemoni.....	16
E. Demokrasi sebagai Wujud Aktualisasi Ideologi.....	18
F. <i>Citizen Journalism</i> sebagai Media Sosial.....	23
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan	31
B. Data dan Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data.....	33
D. Lokasi Penelitian.....	34
E. Objek dan Subjek Penelitian.....	34
F. Sumber Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	36

BAB IV: GAMBARAN UMUM KOMPASIANA.....	39
A. Sejarah Berdiri Kompasiana.....	39
B. Logo Kompasiana.....	39
C. Struktur Admin Kompasiana.....	41
D. Produk Layanan Fitur Kompasiana.....	41
E. Beberapa Istilah dalam Kompasiana.....	43
F. Peta Wacana Demokrasi dalam Kompasiana.....	44
BAB V: RESISTENSI WACANA DEMOKRASI DI INDONESIA	48
A. Praktik Wacana Politik Warga	48
B. Praktik Wacana Politik Pemerintahan.....	59
C. Praktik Wacana Ekonomi Politik.....	62
D. Praktik Wacana Politik Parlemen.....	67
BAB V: Simpulan dan Saran	71
E. Simpulan.....	71
F. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Kajian ini merupakan upaya kritis terhadap posisi *audiences* (warga) di media *citizen journalism* (jurnalisme warga) dalam jaringan (*online*) dan pengaruhnya terhadap media tradisional. Mengapa hal ini perlu dikritisi? *Pertama*, karena di media *citizen journalism online* warga tidak hanya sebagai konsumen dari produksi konten (isi teks) seperti posisi yang selama ini terjadi di media tradisional, melainkan juga warga memposisikan diri sebagai (alat) produksi hingga mendistribusikan konten; bahkan dalam kondisi tertentu warga menjadi bagian dalam ‘membangun’ konten. *Kedua*, apa yang dilakukan oleh warga ketika memproduksi konten dan menyebarkannya di media *citizen journalism* tersebut selama ini dipahami sebagai tindakan sukarela dan tanpa dilandasi oleh motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti uang atau pengaruh atau yang disebut sebagai latarbelakang ekonomi-politik. Hal ini dipertegas oleh Curt Chandler, dosen komunikasi dari Penn State University, yang menyatakan bahwa maraknya warga yang berpartisipasi dalam melaporkan peristiwa di *citizen journalism* dikarenakan ada ketertarikan mereka terhadap sebuah peristiwa dan juga kontribusi yang diberikan semata-mata hanya untuk menyebarkan informasi tanpa ada motif ekonomi maupun politik di baliknya.

*"Citizen-journalists are regular people who contribute to news reporting, not for monetary reward, but because they have a particular interest in a topic," said Curt Chandler, senior lecturer in communications at Penn State. Chandler teaches future journalists how to adapt to a changing media environment, where the audience doesn't just read the news, but helps make it.*¹

¹ Di dalam Jesse Hicks. 2009. *Probing Question: What is Citizen Journalism?* dipublikasikan pada 13 Oktober 2009 <<http://live.psu.edu/story/42186>> (diakses pada 10 Juni 2011).

Ketiga, karakteristik media baru (*new media*) secara langsung maupun tidak akan menjadi pesaing, jika tidak dikatakan sebagai ancaman, posisi media tradisional. Media massa seperti koran, radio, televisi, dan sebagainya tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Warga, dengan adanya fenomena *citizen journalism*, bisa mendapatkan informasi tersebut secara langsung, dari berbagai sumber, dan yang paling pokok lepas dari konstruksi realitas dan obyektifitas dan upaya yang dilakukan oleh lembaga media tradisional.

Pada tataran praktis selanjutnya, warga yang terlibat di dalam media *citizen journalism* tidak hanya sebagai konsumen dari produk, melainkan juga sudah menjadi produsen, pengembang *cum* distributor. Fenomena ini yang berbeda jika melihat posisi warga di dalam media tradisional seperti koran, televisi, maupun radio. Konten, baik yang bersifat informasi maupun hiburan di media tradisional pada dasarnya diproduksi oleh korporasi media yang bersangkutan. Posisi warga hanya sebatas pada konsumen yang mengonsumsi produk konten yang dihasilkan. Tentu saja dalam perspektif kritis bahwa konten yang didistribusikan di media tradisional merupakan hasil produksi pekerja industri, dalam hal ini redaksi, tanpa melibatkan warga. Kondisi ini memungkinkan penyembunyian fakta-fakta sebuah peristiwa, atau bahkan manipulasi terhadap konten yang diproduksi dan bahkan memungkinkan adanya ruang delik press. Warga dalam skema kerja produksi konten (berita) ini menjadi pasif sehingga apapun produk berita yang dihasilkan oleh redaksi itulah yang dikonsumsi oleh warga.

Issues surrounding audiences tend to focus on the impact of media practices upon people & perceptions; how audiences shape media practices; how media practices function in the commodification of knowledge,

*epistemology, and communication more generally; and how the work of audiences is appropriated and sold by media corporations.*²

Sementara itu, kehadiran jurnalisme warga atau *citizen journalism* di internet tidak hanya sebagai penanda bagaimana teknologi mentransformasi pola konsumsi informasi dari media tradisional ke media baru, melainkan juga bagaimana internet mempengaruhi mekanisme produksi, penyebaran, pertukaran nilai, dan konsumsi informasi yang selama ini terpusat pada media tradisional. Karakteristik interaksi yang dimiliki internet memungkinkan proses komunikasi yang terjadi tidak bersifat satu arah selayaknya yang terjadi di media tradisional yang lebih bersifat *one way communication*, melainkan menjadi lebih interaktif dan bahkan menyajikan debat gagasan melalui media baru. Selanjutnya, era teknologi digital (*cyber space*) dan teknologi komunikasi telah mengubah arah komunikasi yang selama ini menganut pola *broadcast*. Jika model *broadcast* adalah komunikasi satu arah, maka dengan kehadiran teknologi komunikasi itu bisa menjadi dua arah bahkan lebih atraktif. Komunikasi terjadi tidak lagi memakai pola dari sumber yang satu menyebar ke banyak (*broadcast*), berpusat, khalayak bersifat pasif, dan penerima berada dalam posisi terisolasi³, melainkan lebih dinamis, tidak tersentral, sampai pada melibatkan khalayak. Atau yang sebagai upaya konstruksi sebuah penilaian media komunikasi dan informasi, bahkan memberikan perhatian hak tentang peran kuasa atau politis dan ekonomi serta proses formasi publik ”...*due attention to the role of power in system economy and.... process of public policy formation*”⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menarik untuk mengkaji lebih dalam, tentang ”Kompasiana” sebagai *citizen journalism* yang

² Alan B. Albarran. 1996. *Media Economics*. Iowa: Iowa State University Press, h. 494.

³ Levy, P. 2001. *Cyberculture*. Minnesota: University of Minnesota Press, h. 223

⁴ Gandy Jr. Oscar H., 1992. *The Political Economy Approach: A Critical Challenge*, An Elgar Reference Collection, h. 23.

fokus kajiannya adalah resistensi kuasa, baik politis maupun ideologis tentang demokratisasi warga Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks ruang publik atau *public sphere* yang diproduksi oleh media massa seolah-olah menjadi kekuasaan institusi media, tetapi sesungguhnya ruang *citizen journalism* memberikan ruang debat dan bahkan kontestasi warga terhadap issue-issue yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan beberapa hal:

1. Bagaimana proses-proses wacana resistensi kuasa warga tentang demokratisasi di Indonesia melalui Kompasania ?
2. Bagaimana hubungan intersubyektif dalam *public sphere-citizen journalism* memproduksi entitas baru ?

C. Tujuan dan Signifikansi

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini didasarkan pada argumen, bahwa realitas kehidupan sosial diproduksi melalui dialektika sosial dengan proses-proses strukturisasi yang tidak lepas dari persoalan berbagai public interests maupun individual. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis kontestasi issue demokrasi di Indonesia pada tahun 2015 yang menjadi komoditas media Kompasania;
- b. Untuk mengungkapkan hubungan mutual yang menjadi substansi komoditas media Kompasania.

2. Signifikansi

Signifikansi penelitian ini, adalah

- a. Mematahkan argumen bahwa *citizen journalism* membangun ketertarikan publik terhadap sebuah peristiwa dan juga kontribusi yang diberikan semata-mata hanya untuk menyebarkan informasi tanpa ada motif atau kepentingan ekonomi maupun politik;
- b. Mengkritisi argumen tentang capaian status atau *social position* dihasilkan melalui pertarungan kepentingan semata.

D. Telaah Pustaka

Objek penelitian ini adalah menempatkan peran media baru (*citizen journalism*) sebagai sarana pertarungan di ruang sosial atau *cyber space* dengan diskursus demokrasi di Indonesia pada tahun 2015 melalui media Kompasiana. Oleh karena itu, karya-karya yang pernah dikaji oleh banyak kalangan tentang *citizen journalism*, antara lain sebagai berikut.

Tulisan Smythe tentang *Communications: Blindspot of Western Marxism Canadian Journal of Political and Social Theory/Revue canadienne de thiorie politique et sociale*, Vol. 1, No. 3 menyatakan bahwa beberapa analisis Marxist Barat mengabaikan kepentingan ekonomi dan politik sistem komunikasi massa, tetapi hanya lebih menitik beratkan pada kemampuan memproduksi aspek ideologi. Kenyataannya berbeda, bahwa media komunikasi massa berhubungan dengan beberapa institusi yang bergerak di bidang periklanan, pemasaran, desain publik relation, produk, dan package merepresentasikan "*blindspot*" dalam teori Marxis.

Penelitian Disertasi Rulli Nasrullah di Program Studi Kajian Budaya dan Media Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, (2003) dengan judul "*Komodifikasi Warga dalam Ruang Citizen Journalism*". Hasil penelitiannya adalah setiap produk konten *citizen journalism* memiliki kepentingan atau motif ekonomi, dengan mengabaikan persaingan/pertarungan komodifikasi produk.

Berangkan dari dua buah kajian di atas penelitian ini menempatkan konsep resistensi dan kuasa sebagai interaksi dialogis, baik hubungan dalam bentuk penolakan, pertarungan, dan bahkan mutual kepentingan. Selain itu, menempatkan konsep demokrasi sebagai konten yang diproduksi melalui hubungan intersubjektif.

E. Kerangka Teori

Dalam perspektif *cultural studies*, internet merupakan ruang di mana kultur yang terjadi itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Sebagaimana sifat dasar perspektif ini yang mengaburkan kelas-kelas sebagai sebuah strata yang ada di tengah masyarakat, *cultural studies* memberikan semacam perlawanan dari sebuah kemampuan strukturasi kelas sosial. Gerakan-gerakan sosial seperti feminisme menandakan bahwa sebuah kultur tidak hanya diciptakan oleh kelas tertentu, dalam teori Marx klasik misalnya oleh mereka yang menguasai alat-alat produksi dan memiliki modal, namun bisa dihasilkan oleh masyarakat bahkan individu yang merupakan agen-agen sosial⁵. Jika memakai term ekonomi-politik, maka kultur merupakan komoditas yang diproduksi. Artinya, pendekatan *cultural studies* dalam melihat budaya siber yang ada di internet memberikan arah untuk melihat bagaimana proses komodifikasi itu terjadi di ruang virtual; dengan tentu saja mengabaikan kajiannya berdasarkan perdedaan kelas hingga hubungan pekerja-pemodal sebagaimana hal ini menjadi sentral awal diskursus tentang ekonomi-politik. Jika ekonomi-politik mengawali pembahasannya melalui “*macrosocial organization of power*” atau organisasi kekuasaan, maka *cultural studies* mendekatinya melalui “*local organization of power*” dimana kekuasaan itu berada didalam diri subyek atau individu itu sendiri

⁵ Vincent Mosco. 1996. *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication, h. 251

(*intersubjective*). Bagi Mosco, fokus dari *cultural studies* terletak pada teks sebagai salah satu titik awal untuk melihat bagaimana fenomena sosial itu terjadi. Pemaknaan teks sering berbeda antar subjek yang satu dengan lainnya, menurut Storey⁶ adanya proses pertarungan ideologis dengan menghadirkan makna ganda, akibat dari tindakan artikulasi, sebab makna harus diekspresikan dalam konteks yang spesifik.

McQuail⁷ menegaskan bahwa ada hubungan antara ekonomi-politik dan budaya di media. Aspek ekonomi-politik memainkan peran dari pengaturan produksi budaya yang terjadi di industri media massa sebagai 'industri dengan kesadaran'. Media pada dasarnya merupakan institusi yang disetir oleh logika ekonomi sampai pada perubahan budaya. Aspek penting dalam pemikiran McQuail ini adalah komodifikasi budaya dalam bentuk 'perangkat lunak' yang diproduksi oleh dan untuk 'perangkat keras' komunikasi yang keduanya dijual dalam pasar yang lebih luas.

Teori *cyberculture* seperti Manuel Castells menegaskan bahwa perkembangan teknologi internet pada dasarnya melahirkan apa yang disebut sebagai "*informational capitalism*"⁸. Bahwa teknologi dan entitas yang berada di dalamnya seperti produsen (perangkat keras maupun lunak), distributor, pengiklan, maupun pengguna merupakan model ekonomi baru yang melandaskan produk atau komoditasnya pada informasi.

"We are still in a capitalist mode of production, in terms of the relations between capital, property ownership and labour (even if, as we shall see, he argues that the social structure, i.e. class, has fundamentally changed). Following his old mentor, Alain Touraine, he specifies a mode of development

⁶ John Storey, *Cultural Studies and The Study of Popular : Theories and Methodes*, terj. Laily Rahmawati, 2007. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode: Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra, h. 124

⁷ Denis McQuail. 2011. *Komunikasi Massa*. terj. Putri Iva Izzati. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, h. 124

⁸ Castells, Manuel. 1996. *The Information Age: Economy, Society & Culture, Vol.1: The Rise of The Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd. Dan lihat. Castell, Manuel. 2010. *Information Age; Economy, Society, and Culture*. Oxford: sBlackwell Publishing Ltd.h. 18.

*as 'the technological arrangements through which humans act upon matter (nature), upon themselves, and upon other humans' in order to generate wealth. The technological arrangements through which humans act upon matter (nature), upon themselves, and upon other humans' in order to generate wealth"*⁹.

Bagi Castells perkembangan teknologi baru memberikan paradigma baru pula terhadap bentuk-bentuk ekonomi baru. Namun patut dicatat, bagi Castells teknologi informasi tidaklah serta merta merubah kultur yang ada di tengah masyarakat dan jika ada perubahan kultur pun dikarenakan oleh interaksi yang terjadi antara keduanya¹⁰. Teknologi informasi jika dipandang sebagai sebuah mesin memberikan kemudahan terhadap transformasi informasi itu sendiri menjadi produk (komoditi) dari sebuah proses produksi "the products of new information technology industries are information producing devices or information processing itself"¹¹. Informasi menjadi komoditas yang diperebutkan baik oleh pekerja, pemilik perusahaan, maupun melibatkan negara. Dengan kata lain, siapa yang bisa menguasai *cum* memanipulasi informasi, maka dianggap akan memenangi persaingan global sebagaimana yang disebut Castells sebagai "dot.com businesses". Juga, individu sebagai entitas secara otomatis memposisikan dan diposisikan sebagai pekerja yang telah terprogram atau "self-programmable".

Namun, dalam pandangan McQuail (2011:244-245), jika menilik dari sudut pandang ekonomi khalayak memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan institusi ekonomi lainnya. Hal ini disebabkan selain karena media dipengaruhi oleh ekonomi, politik serta teknologi memainkan peran dalam membentuk khalayak media juga. Karakter khalayak media, sebagai misal, seringkali tidak hanya muncul karena fungsi politik media dalam

⁹ Castells, Manuel. 2000. "Materials for an Exploratory Theory of the Network Society". *British Journal of Sociology* 51(1): 5 – 24.

¹⁰ Castells, Manuel. 2010, *Information Age*,...h.5.

¹¹ Castells, Manuel. 1996. *The Information Age: Economy*,...h. 67.

demokrasi, melainkan juga dari fakta bahwa informasi, budaya, dan gagasan yang ditawarkan media dianggap sebagai kepemilikan kolektif.

Individu sebagai sebuah entitas di media internet juga menjelma tidak hanya sebagai konsumen melainkan juga sebagai produsen; bahkan dalam beberapa kasus entitas itu sekaligus menjadi konsumen/produsen. Misalnya, ketika individu membuka situs *citizen journalism* di internet, maka saat itu pula kondisi konsumen/produsen terjadi. Individu menjadi konsumen saat ia menggunakan media *citizen journalism* atau membaca konten. Berbarengan dengan itu, saat individu menulis serta memublikasikan konten di media *citizen journalism*, pada dasarnya individu tersebut tengah memproduksi informasi sebagai sebuah komoditas.

Juga, entitas yang ada di internet merupakan bagian dari proses produksi dan juga sebagai sumber dari apa yang diproduksi tersebut, maka pencitraan diri di dunia virtual merupakan upaya yang dilakukan individu untuk mendapatkan balasan (*reward*), baik secara ekonomi maupun politik. Fenomena ini dinyatakan oleh Joseph E. Davis (2003) yang menawarkan konsep "*commodification of self*". Pencitraan diri pengguna dipandang sebagai upaya komodifikasi diri yang tidak hanya terpaku pada sesuatu (barang/benda) yang bisa dijual maupun dibeli, namun kehidupan pribadi juga bisa dikatakan sebagai komoditas. Komoditas terhadap diri disebut Davis sebagai "*personal branding*" yang merupakan upaya pemanfaatan pencitraan diri maupun image tentang diri untuk kepentingan ekonomi. "[a] *strategy of cultivating name and image of ourselves that we manipulate for economic gain*" (hal. 41).

Pemanfaatan media baru oleh khalayak ini dimungkinkan terjadi karena posisi khalayak tidak lagi sebagai bagian massa yang bisa dikontrol (McQuail, 2011:150). Bahkan McQuail mengajukan tesis bahwa keragaman penggunaan dan pengawasan yang terjadi di media baru merupakan hambatan tersendiri dalam mencirikan masa depan media baru itu sendiri. Media baru

menciptakan banyak varian dan tidak ada satupun yang mendominasi selayaknya yang terjadi di media tradisional. Inilah yang disebut Rice sebagai 'batasan antara penerbit, produsen, distributor, konsumen, dan pengamat konten semakin kabur' (Rice, 1999:29 dalam McQuail, 2011:153). Malah, bagi McQuail, media baru dan budaya yang muncul di dalamnya telah mengaburkan 'lembaga media'. Artinya, media baru memberikan kebebasan kepada khalayak (*user*) untuk mempublikasikan konten tanpa perlu pengawasan yang ketat. Implikasi dari kebebasan tersebut, memakai perspektif ekonomi-politik, bisa saja media baru dimanfaatkan oleh khalayak untuk mempublikasikan konten (komoditas) demi kepentingan materi (*value*).

Terkait dengan media baru dan komoditas, dalam pandangan Miller (2010) media baru memberikan sarana bagi aktivitas menulis tentang diri di jurnal elektronik. *Blogging* pada dasarnya merupakan kegiatan menampilkan citra diri atau memproduksi konten (informasi) yang terpusat pada diri; meminjam istilah yang dipopulerkan Giddens, Miller menyebutnya sebagai konsep "*individualization*" (h:535). Secara umum, bisa dikatakan, term "*individualization*" disandarkan pada sebuah proses dimana komunitas dan hubungan personal di dalamnya, bentuk-bentuk kelompok sosial dan komitmen terhadap kelompok tersebut semakin berkurang karena faktor-faktor seperti sejarah, tempat dan atau tradisi. Pada saat itulah individu membebaskan dirinya dari ruang, tradisi, pengaruh globalisasi, maupun sejarah dan pada akhirnya individu akan memposisikan dirinya sesuai dengan konteks kebutuhan saat itu, membentuk diri serta mengkonstruksi diri sebebaskan-bebasnya; dalam pandangan Giddens, sebagaimana dikutip Willey, bahwa hubungan yang murni (*pure*) terbangun secara sadar dan sukarela. Selanjutnya hubungan tersebut akan semakin erat apabila di antara individu pancaran identitas diri di antara individu tersebut merefleksikan hal yang sama, saling menyadari adanya kebutuhan, dilandasi rasa kepercayaan, serta adanya pengungkapan diri (*self-disclosure*) untuk meraih kepercayaan.

Inilah yang menjadi perhatian Miller tentang informasi diri yang didistribusikan melalui media baru dan aktivitas *blogging*. Konten yang dihasilkan oleh individu pada dasarnya memuat informasi tentang dirinya dan informasi itu menjelma sebagai komoditas yang digunakan untuk membangun dan merawat hubungan dengan individu lain. Konsep produksi informasi diri tersebut bagi Miller merupakan salah satu karakteristik dari entitas dalam jejaring, sebagaimana dijelaskan oleh Castells (2000,2006), dan menjadi semacam “database”, dalam pandangan Manovich (2001), yang bisa dikonsumsi oleh entitas lainnya.

Blogging, for the most part, is based on the notion that information is a commodity that is used to build and maintain relationships. In personal journal blogs, it is personal information, created through relationships of mutual self-disclosure, which attains a commodified status. In the case of other types of blogging (political, news, technological and the like), substantive information is commodity. In both these cases, this exchange is based on the logic of the ‘pure’ relationship: an exchange of substantive information achieved through dialogue. This exchange creates tenuous individually-oriented self-defined communities or networks, which revolve around shared interests and dialogic exchange related to those interests. (hal.536)

Inilah mengapa di internet individu menjadi entitas yang selain mengonsumsi juga menghasilkan produk. Sebagaimana telah diterangkan oleh Castells, sifat internet yang menghubungkan antar entitas melalui perantara perangkat komputer pada akhirnya menciptakan perangkat tersebut sebagai pabrik dalam memproduksi produk informasi; proses ini disebut Boellstorff sebagai “*creationist capitalism*” (2008:206), informasi atau konten yang ada di dunia virtual pada dasarnya merupakan produk kreatif dari entitas itu sendiri.

Konsep produk kreatif dari entitas diri inilah yang harus dipahami melalui kerangka kerja *culture studies*, bahwa masyarakat memiliki kemampuan kreatif dan kritis untuk melakukan resistensi kepada dominasi. Dalam hal ini, ada tiga pendekatan untuk mengkaji resistensi menurut

Saukko (2003:39-40; Willis's, 1978; Radway's, 1984; Fiske, 1989), adalah *pertama, critical contextualist approach*, pendekatan ini melihat konsumsi image media yang subversive, artinya kepentingan dalam efeknya pada struktur nyata dominasi, misalnya issue/konten dilihat dalam konsep patriarki atau struktur kelas sebagai pihak yang dominan. *Kedua, pendekatan optimistic textualist*, mengkaji resistensi dari sisi resistensi simbolis. Artinya aspek yang dianalisis oleh pendekatan ini pada aspek optimisme kemampuan untuk melakukan perlawanan pada struktur-struktur politik. *Ketiga, contingent approach*, suatu pendekatan yang menganalisis aktifitas resistensi secara partikuler dari beberapa perspektif dan sudut pandang *sphere of life* yang berbeda. Kepentingannya adalah menilai tipe-tipe aktifitas resistensi politis dan apa sajakah tipe-tipe politis pendukungnya.

Dalam konteks aktifitas resistensi ini, maka dalam kajian ini demokrasi dipahami dengan serangkaian hak atau cara-cara mengorganisir kehidupan politik dan ekonomi negara. Konsentrasi yang dipraktikkan adalah suatu prosedur yang dapat digunakan oleh berbagai kelompok untuk mencapai keputusan kolektif (Catt, 1999:5).

F. Sistematika Laporan

Pembahasan penelitian ini mencakup beberapa bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Globalisasi dan demokrasi, deregulasi lanscape media, komersialisasi media pemerintah. Friksi konsep modalitas dan konsep pengendalian dalam hegemoni, Demokrasi sebagai Wujud Aktualisasi Ideologi dan Politik. *Citezen Journalism* sebagai Media Sosial

Bab III: Metode Penelitian

Bab IV: Gambaran umum Kompasiana

Bab V : Resistensi Demokrasi di Indonesia

Bab VI Kesimpulan dan Saran



BAB II

GLOBALISASI DAN DEMOKRASI

A. Globalisasi dan Ragam Ideologi

Istilah globalisasi merujuk pada persoalan integrasi menyeluruh penjurur dunia berkaitan dengan kemanusiaan dan penekanan waktu dan jarak dari berbagai dimensi; berupa interaksi manusia di planet bumi¹. Peningkatan integrasi yang meliputi persoalan ekonomi, sosial dan politik di seluruh dunia, tanpa mengenal batas-batas negara-bangsa, secara khusus melalui perdagangan internasional dan aliran modal, gagasan-gagasan dan kemasyarakatan yang mentransfer budaya dan teknologi, dan perkembangan regulasi transnasional². Di samping itu, memahami globalisasi dalam pendekatan budaya merupakan suatu fenomena yang terjadi berkaitan dengan pengalaman kehidupan sehari-hari, seperti selera individu yang dipengaruhi oleh proses difusi tentang berbagai komoditas dan gagasan-gagasan, yang merefleksikan suatu tolok ukur praktik budaya yang terjadi di seluruh dunia³.

Dalam konteks proses difusi ini, pengaruh media komunikasi menjadi salah satu instrumen yang paling efektif untuk mempengaruhi khalayak (masyarakat) secara luas di penjurur dunia ini. Persoalan ini akan menjadi argumentasi bahwa kemajuan komunikasi dan transportasi teknologi dan peran yang dimainkan oleh media memberikan kontribusi tidak adanya batas-batas teritorial dan mengaburkan area dan batas-batas geografis (*the deterritorialisation and the blurring of geograpical spaces and boundaries*). Oleh karenanya, kontribusi ini menjadikan dunia ini seperti kampung kecil yang

¹ princesspakeeza@yahoo.com

² www2.truman.edu/~marc/resources/terms.htm

³ www.britannica.com/EBchecked/topic/146289/culture

dihuni masyarakat, bermacam-macam budaya, dan identitas yang hadir setiap hari melalui kontak interpersonal (*face to face contact*) satu sama lain⁴.

B. Deregulasi landscape media

Pada tahun 1990 terlihat bentangan poses-prose liberasi dari Cape sampai Cairo, berhubungan dengan kebijakan deregulasi dan perubahan legislatif. Diskursus liberasi mengantarkan beberapa negara di Afrika sampai dengan penyebaran ekonomi liberal media dan kebijakan-kebijakan informasi. Munculnya problem kompleks penyiaran komersial secara privat dan channel-channel media periode ini merupakan gelombang deregulasi yang menekankan pra-keunggulan dari kapital pribadi hingga kapital negara.

Implikasi bagi jurnalisme warga⁵ sebagai berikut:

1. Ada sebuah pluralitas platform-platform, secara teoritis memberikan kesempatan-kesempatan bagi warga untuk melakukan eksperimen melalui komunikasi jurnalistik warga;
2. Adanya sejumlah sumber-sumber informasi yang menjadi dasar sumber perbedaan, dorongan, jurnalisme konvensional akan mengudara jurnalis warga dalam produksinya; Hal ini menjadi argumentasi bahwa penggunaan lebih besar masyarakat yang berbeda yang termarginalisasi dari media maenstream;
3. Adanya kesempatan yang lebih besar bagi warga untuk memiliki media dan melakukan pertarungan atau counter terhadap efek-efek laporan yang diabaikan dengan konsentrasi yang tidak sehat bagi pemilik media;
4. Serangkaian outlet-outlet media baru pada area bebas yang lebih jauh jangkauannya, seperti station-setation radio komunitas, kemungkinan menjangkau akses menyeluruh untuk media bagi warga yang memiliki kepentingan ke dalam sistem jurnalisme warga.

⁴ MA, Abd Elmalek Essaadi University, Faculty of Letters, Tetouan, Morocco, Elazzouzi_123@hotmail.com. Pol. Sc. Int. Rel., X, 1, p. 150–154, Bucharest, 2013

⁵ Fackson Banda, (n.y), *Citizen Journalism & Democracy in Africa*, Highway Africa: South Africa. h.8.

C. Komersialisasi media pemerintah

Sepanjang adanya liberasi politik dan ekonomi memberikan peluang pada pemilik media untuk melakukan komersialisasi media lebih besar. Kompetisi terjadi para pemilik media untuk mempertahankan eksistensinya. Seperti restrukturisasi yang dilakukan oleh sistem media pemerintah untuk merespon komersialisasi menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan kemunculan stations radio komunitas, ketika digembar-gemborkan pertumbuhannya bagi media yang lebih pluralistik atau media yang sebatas menyenangkan banyak audience yang telah mempertanyakan tentang keberlangsungan aspek finansialnya.

Lingkungan kompetisi ini akan berpengaruh secara negatif atas kemampuan dengan rumah media untuk menggunakan/memperkerjakan dan menahan staf yang berpengalaman. Akan menjadi sumber-sumber keuangan bagi organisasi-organisasi media untuk melakukan uji-coba dengan melakukan konten yang inovatif untuk kepentingan publik⁶. Seperti halnya, situasi jurnalis warga harus dapat memberikan kolom bacaan yang dapat digunakan oleh sumberdaya manusia.

D. Friksi konsep modalitas dan konsep pengendalian dalam hegemoni

Suatu konsep kontrol komprehensif adalah berbagai bentuk ekspresi kaum bourgeois yang secara historis merefleksikan hierarki kelas dan friksi-friksi kelas. Ekspresi mereka adalah ideologis, dan meminjam istilah Gramsci merupakan kepekaan hegemoni yang terbangun melalui proses sejarah dalam konfigurasi modal atau kapital. Friksi modal, menurut Hicel (1975) merupakan struktur-struktur sosialisasi yang terjadi melalui kontradiksi fundamental antara pemegang modal dan buruh yang diartikulasikan pada konfigurasi kelas secara konkrit. Friksi-friksi kelas berkuasa (pemodal)

⁶ Fackson Banda,(n.y), *Citizen Journalism & Democracy in Africa*, Highway Africa: South Africa.h.9.

merupakan sejumlah kepentingan bagi pemegang modal yang melakukan proses kristalisasi fungsi-fungsi pokok pada proses-proses akumulasi modal.

Fungsi-fungsi tersebut memberikan orientasi umum, pembatasan-pembatasan kepentingan, dan pengalaman-pengalaman kolektif membentuk unsur-unsur karena sebuah koalisi kepentingan-kepentingan dan konsep kontrol yang mengaspirasikan sesuatu hal yang komprehensif. Dalam konteks ini, kompetisi pemilik modal secara individual membuat kepentingan khusus yang tampak sebagai kepentingan umum pada level negara, Hickel (1975: 151), “*resides the actual relevance of bourgeois fractioning.*”

Beberapa fungsi tersebut terakumulasi dengan arus (*circuit*) modalitas yang berbeda, yang mencakup keuangan, sirkulasi komoditas, pertukaran uang terkait dengan karyawan dalam proses produksi. Dalam hal ini, jumlah modalitas yang paling dekat, yang merepresentasikan total kuantitas komoditas, dan pada saat yang sama modalitas merupakan bentuk yang paling umum dan abstrak. (Fennema 1982, Gill 1990; see also Burch 1980). Dalam konteks modalitas ini, Modal atau *capital* merupakan logika yang mengendalikan bentuk-bentuk perjuangan. Bagi Bourdieu (1990) modal mencakup sesuatu yang material dan imaterial atau atribut invisibilitas yang mengandung aspek kultural, seperti status, prestise, dan otoritas sebagaimana yang dinamakan dengan modal simbolik. Sementara hal-hal yang bernilai budaya dan pola konsumsi disebut modal budaya, sedangkan modal sosial berupa kekuatan jaringan yang berpengaruh dan membantu individu untuk memperoleh posisi sosial. Setiap tindakan individu adalah produk dari relasi habitus dan ranah, di samping itu, keduanya dibentuk oleh kekuatan-kekuatan lain serta berbagai modal yang dimiliki individu dan bahkan individu yang sedikit modal ataupun tidak memilikinya.

Selain modal sebagai sumber perjuangan dan yang diperebutkan, setidaknya trio konsep yang ditawarkan Bourdieu tentang mekanisasi “habitus-capital-ranah” akan melahirkan praktik sosial. Praktik sosial dalam

hal ini untuk melihat bagaimana wacana yang dibangun oleh media sosial tentang issue-issue yang dikembangkan dan sekaligus menjadi kontestasi yang sarat ideologis dan politis.

E. Demokrasi sebagai Wujud Aktualisasi Ideologi dan Politik

Perubahan ekonomi dan geografis yang termediasi melalui proses-proses global akan berdampak pada perubahan relasi antara, agama, negara, dan masyarakat. Perubahan ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya proses-proses sekularisasi terus bertahan dan ditopang oleh kekuatan pasar global⁷. Hubungan antara negara, masyarakat dan intitusi keagamaan inilah yang terjadi hubungan *avis vs a vis* atau yang sering diistilahkan proses demokratisasi.

Berbagai lintas penjujur dunia memiliki corak praktik demokrasi yang berbeda-beda, atau sebuah negara berdemokrasi yang diinginkan oleh penyelenggara negara, tetapi ada persetujuan kecil tentang bagaimana secara pasti untuk mencapainya. Setiap negara tentunya telah memiliki berbagai macam procedure, atauran dan sistem pemerintahan dan bahkan sistem keyakinan sebagai basis demokrasi, apa yang mungkin dilakukan dan yang tidak mungkin dilakukan untuk warga masyarakat suatu negara. Semua kelompok masyarakat tentunya memiliki "common sense"⁸ untuk membuat berbagai keputusan yang berpengaruh pada kelompok masyarakatnya. Pembahasan teoritis ini, setidaknya mempertanyakan tentang bagaimana cara-cara individu atau kelompok mempraktikkan demokrasi, khususnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan suatu negara.

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani "demokratia", yang tersusun dari dua susunan kata "demos" berarti masyarakat dan "kratos"

⁷ Guy Ben-Porat, *Globalization, Secularization and Relegion- Changing Terrain?*, Europen University Institute, 2008.

⁸ Hellen & Catt, *Democraci in Practice*, London: Routledge, 1999, h.4.

berarti peraturan atau dalam penggunaan kata kerjanya adalah menguasai dan memerintah. Dalam hal ini bisa dipahami sebagai *rule of people* berarti peraturan untuk masyarakat. Atau bahkan dalam pandangan Barat, demokrasi sering dihubungkan dengan kedua institusi-institusi dan norma-norma kultural. Demokrasi sering digunakan juga untuk memaknai serangkaian hak-hak atau cara mengorganisasi kehidupan politik dan ekonomi suatu negara⁹. Lebih spesifik pandangan demokrasi yang ditawarkan oleh Heper¹⁰, yaitu demokrasi menjadi penting karena untuk memberikan atribut khusus, karena demokrasi tidak menempatkan suatu dogma tertentu, bahkan memberikan ruang lebar tentang artikulasi perbedaan pandangan (*points of view*) dan memungkinkan untuk memberikan jawaban atas kesalahan masa silam; menginjak-injak hak-hak individu dan kolektif, serta kebebasan yang harus ditolak oleh demokrasi; paham fundamentalisme sebagai ancaman bagi demokrasi suatu negara karena ia menolak dialog, bahkan lebih jauh bahwa karakteristik demokrasi adalah memiliki kepercayaan tentang nalar-logis masyarakat atau "*common sense of people*".

Dalam perubahan perjalanan kesejarahan tentang demokrasi di seluruh penjuru dunia pada akhirnya gagasan utama tentang demokrasi selalu berkaitan dengan gagasan-gagasan hak-hak individu, otonomi, dan kesetaraan sebagai argumen teoritisnya. Dalam konteks ini, ada beberapa metode yang digunakan untuk mencapai pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh kepada suatu kelompok masyarakat dalam situasi tertentu, misalnya pasar merupakan area yang diadvokasi oleh pemimpin partai politik, seleksi acak

⁹ Ibid, h. 5.

¹⁰ Metin Heper, "A Democratic-Conservative" Government by Pious people: The Justice and Development Party in Turkey, di dalam Ibrahim Abu Rabi', *Contemporary Islamic Thought*, Australia: Backwell Publishing, 2006. H.346.

tentang pemilihan pemimpin (*random selection*), kedektatoran (*dectatorship*), dan penguasa elit¹¹.

Kekuasaan demokrasi dikalkulasi dengan kekuatan, dan beberapa kelompok adalah secara instrinsik dalam bentuk-bentuk membenaran yang memberikan legitimasi kepada kekuatan politik dalam berbagai demokrasi. Kekuasaan demokrasi adalah mengkalkulasi kekuatan, dan beberapa kelompok adalah yang secara integral pada beberapa teknologi yang memberikan efek bagi demokrasi sebagai suatu serangkaian partikular mekanisme peraturan¹².

1. Demokrasi dan Pembenaran Teoritis

Demokrasi memiliki beberapa argumen teoritis dalam setiap diskusi tentang berbagai kepentingan masyarakat maupun persoalan individual. Argumentasi yang dapat dijadikan dasar gagasan utamanya adalah gagasan kesetaraan (*equality*) dan kebebasan (*liberty*). Terkadang terjadi masalah lain, adalah kebebasan individu dibatasi oleh implementasi kesetaraan yang juga dapat menghambat kesetaraan itu sendiri. Beberapa cara dari berbagai ketegangan di antara kesetaraan dan kebebasan individu tersebut dapat dijelaskan melalui argumentasi pokok perbedaan tipe-tipe prosedur demokrasi.

Kesetaraan (*equality*) sering diartikan semua sama dalam beberapa penghormatan yang penting atau *all are the same in some important respect*, menjadi dasar “ *common Humanity*”. Gagasan lain yang dijadikan basis kesetaraan ini, adalah kewarganegaraan (*citizenship*), kemampuan untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri sendiri, kapasitas berpikir rasional, penyangga ekonomi dalam suatu negara, dan kemampuan untuk

¹¹ Hellen & Catta,....h. 6.

¹² Nikolas Rose (1999) *The Powers of Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press: 200.

mempertahankan negaranya sendiri¹³. Semua gagasan era sekarang ini, kesetaraan dijadikan pertimbangan dalam setiap kehidupan umat manusia. Kemampuan yang sama dapat diinterpretasikan dengan memberikan pilihan setiap orang atau menjamin ketidaksetaraan dalam kehidupan sosial ekonomi tidak berpengaruh menjadi setara dalam kehidupan politik. Wollstoncraft and Mill, adalah keduanya yang pertama kali melakukan advokasi kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan tentang ekonomi dan sosial dan juga dalam ruang politik (*politic sphere*) untuk membangun demokrasi¹⁴.

Paham Liberal mengajarkan tentang "hak" sebagai prioritas yang harus diperjuangkan oleh setiap individu¹⁵. Dengan kata lain, sistem hak-hak individual dibenarkan karena membentuk suatu kerangka kerja semua pilihan yang berbeda, misalnya prioritas tentang kebebasan beragama merupakan pilihan spiritualitas individu. Oleh karena semua hak tersebut mengidentifikasi pada sesuatu yang fundamental. Setidaknya, ada perbedaan pendapat tentang peran negara dalam melakukan intervensi ranah domestik maupun publik; sejauhmana negara memproteksi kebebasan masyarakat sipil, misalnya hak-hak kekayaan, hak memilih, kebebasan berbicara/berpendapat, kebebasan beragama dan berserikat) dan juga terkait dengan pasar bebas, yang mana negara memberi ruang atau kesempatan yang setara kepada setiap orang dalam melakukan akumulasi di pasar.¹⁶

Kebebasan (*liberty*) memiliki konotasi yang beragam sebagaimana konsep kesetaraan (*equality*) dan harapan-harapan demokrasi. Miller¹⁷ membedakan tiga serangkaian gagasan tentang kebebasan, yaitu republik, Liberal dan idealis. Pandangan paham republik, bahwa seseorang akan bebas

¹³ Hellen & Catta,....h.7.

¹⁴ Held D., *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press, 1987 h. 99.

¹⁵ Michael J.Sandel, ed., *Liberalism and Its Critics*, New York:New York University Press, 1984, h. 4

¹⁶ Rosemarie Tong, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Charlote: Westview Press, 2009, h. 12.

¹⁷ Miller. D. *Liberty*, Oxford: Oxford University Press, 1991, h. 2-4

jika menjadi bagian masyarakat politik yang bebas. Berbeda dengan pandangan paham Liberal, bahwa individu dapat melakukan sebagaimana mereka menginginkan tanpa hambatan atau bebas. Sedangkan paham Idealis berpendapat, bahwa otonomi adalah penting dan juga autentisitas keinginan, seseorang adalah bebas jika mengikuti realitas keinginan mereka.

2. Paradok tentang Problem Justifikasi

Membayangkan suatu masyarakat dalam pemerintahan yang legitimasi, terutama berbagai institusinya, prosedur, undang-undang, pengambilan keputusan, kebijakan-kebijakan yang ada ataupun setidaknya tidak secara langsung. Tindakan pemerintah dan warga yang terkendala/terhambat oleh serangkaian peraturan-peraturan spesifik dalam suatu konstitusi publik menjadi bumerang bagi kedua belah pihak¹⁸.

Konstitusi mencakup prosedur tidak hanya bergantung pada pilihan-pilihannya, membagi otoritas politis, memonitoring kekuasaan politis, konstitusi mengkhususkan serangkaian proteksi kepada individu-individu dari intervensi pemerintah, pemerintahan luar negeri, dan oleh individu-individu lain, apakah sering didasarkan pada suatu menu atau schedule hak-hak dan kebebasan. Menu ini mengkhususkan hak-hak untuk bergantung dan pertukaran properti, privasi, perlidungan yang sama di bawah hukum, menjadi proses kewajiban dan seterusnya¹⁹.

Suatu hal yang sering terjadi adalah situasi politis yang aman didasarkan oleh sebuah konstitusi. Secara alamiah, konstitusi yang kuat menjadi harapan bagi masyarakat sipil dari berbagai elemen organisasi maupun berbagai kelompok yang berbeda, misalnya organisasi etnis, asosiasi-asosiasi yang efektif dan profesional, kelompok-kelompok keagamaan, NGO, aliansi politik, dan klub-klub sosial, dan lain-lain

¹⁸ Robert B. Talisse, *Democracy and Moral Conflict*, New York: Cambridge University Press, h. 11.

¹⁹ Ibid.

F. *Citizen Journalism* sebagai Media Sosial

Gagasan umum tentang media warga (*citizen media*) dibangun melalui salah satu kekhasan jurnalisme warga yang dapat dilokalisasi ke dalam suatu keserbaragaman kritis tentang media massa konvensional dan jurnalisme. Setiap gagasan media telah mengundang kritik oleh mereka yang melihat konsep “mass/massa” sebagai rekayasa (*desingating*) suatu audience yang bersifat nyata berbeda dan luas dan audience yang potensial atau publik untuk media. Sebagaimana pendapat McQuail, gagasan tentang publik massa dapat dikonseptualisasikan secara bervariasi. Hal tersebut menjadi jelas, bahkan mengalami perubahan secara kasualitas, dengan istilah “*public*” dapat berarti sejumlah barang yang berbeda dalam konteks berbeda. Pengertian ini dapat mendasarkan pada sekumpulan massa/warga atau yang disebut dengan “*It can refer to an aggregated mass, all, or some members of a society, an audience, or the citizenry*”²⁰.

Walaupun pengertian jurnalisme warga adalah sudah jelas, bahwa kemunculannya secara konseptual berhubungan dengan perdebatan tentang jurnalisme tradisional (*normative nature of journalism*). Perdebatan tersebut tidak sampai mendiskusikan berbagai teknologi media baru, seperti internet, *world-wide web (WWW)*, *HP* dan lain-lainnya. Hal tersebut, dieksploitasi secara global, dengan memperkenalkan teknologi media baru terhadap pendefinisian jurnalisme sebagai suatu praktik sosial²¹. Meninggalkan jurnalisme yang tidak terproteksi mengalami penyimpangan diibaratkan sebagai orang asing. Jurnalisme selalu mengklaim pada pelayanan publik tetapi, sebagaimana tercatat gagasan kepentingan publik telah terfragmentasi dalam pembangunan berbagai media baru. Bagi media profesional tidak ada kesempatan yang longgar atas klaim-klaim operasional kepentingan publik

²⁰ McQuail, D. 1987. *Mass Communication theory: an introduction*. London: Sage.h.29.

²¹ Fackson Banda,(n.y), *Citizen Journalism & Democracy in Africa*,Highway Africa: South Africa.h.25.

tanpa mendemonstrasikan apa yang dimaksudkan. Setiap doktrin jurnalisme profesional adalah di bawah api dalam abad dekonstruksif.

Pada prinsipnya ada dua tipe jurnalisme warga²², yaitu non-institusi dan institusi. Pertama, bentuk-bentuk non-institusi jurnalisme warga adalah institusi –ekstra (bebas), menempatkan individu pada praktik inti (*the core of practice*). Praktik inti ini tampak menjadi gagasan jurnalisme warga yang meminjam istilah dirinya dapat dibaca kepada bentuk-bentuk yang berbeda dari jaringan sosial, di mana persoalan privasi warga menggunakan suatu kombinasi platform untuk mengenerasikan isi dan menyebarkannya secara luas menjadi sesuatu yang mungkin. Dengan demikian, jurnalisme warga yang bersifat non institusi ini berarti tipe jurnalisme warga yang berkisar pada aspek individual belaka. Artinya tidak mengambil sumber-sumber pada hambatan yang bersifat kerangka kerja organisasi.

Jurnalisme warga-institusional, mendasarkan bentuk struktur organisasi atau kemampuan memberikan “*constraining*”, melengkapi “*constraints*” eksternal yang bersifat minimal. Secara individual masih ada aspek penting yang bersifat praktis, menggambarkannya komunikasi dialogis dari beberapa para penerima isinya. Suatu kunci pokok tipe jurnalime warga ini adalah bagaimana institusi media tampak menjadi penggerak ke ruang (*space*) yang diciptakan oleh jurnalisme warga non-institusional, mencari keuntungan darinya, dan menginjeksi insting profesional yang dimiliki mereka, ritual, dan mempraktikkan di ruang yang diciptakannya.

Dan Gilmor²³ (2006:27-41) memberikan karakteristik *media citizen journalism*, antara lain:

1. *Mail Lists* dan *forums*, dibuat untuk kepentingan masyarakat yang berbeda;

²² Fackson Banda,(n.y), *Citizen Journalism & Democracy*...h. 28-29.

²³ Gillmore, D. 2006. *We the media: grassroots journalism by the people, for the people*. Beijing, Cambridge, Farnharm, h. 27-41

2. *Weblogs*, beberapa media ke beberapa media yang memiliki ekosistem yang sedang berkembang ke dalam ruangan di antara email; dan web, dan missing link dalam rantai komunikasi;
3. *Wikis*, program-program server yang memperbolehkan para pemakai untuk mengkolaborasi dalam bentuk isi sebuah *Web site*;
4. *SMS*, suatu pelayanan yang diberikan oleh jaringan provider yang mengizinkan para pelanggan untuk mengirim pesan;
5. *Mobile-connected cameras*, yang mencakup kamera digital setiap hari yang mengizinkan para pengguna mendownload; storing, edit, dan mengirim gambar setiap waktu dan dimana saja.
6. Internet '*boradcasting*', masyarakat di mana saja bisa merekam dan peng-*upload* apa saja di internet, begitu juga mendistribusikannya;
7. *Peer-to-peer (P2P)* dapat melakukan sharing file;
8. *RSS (Really Simple Syndication)*, yang memperbolehkan para pembaca *blog* dan macam-macam site lain yang memiliki computer dan perlengkapan (peralatan) otomatis lain yang didapatkan kembali isi yang mereka butuhkan.

Keseluruhan pengalaman komunikasi *online* dibuat memungkinkan oleh berbagai teknologi media baru sebagai "*cybersphere*".

Di samping media sosial baru tersebut di atas, ruang ciber secara partikular memberikan ruang bagi warga/publik untuk melakukan perlawanan atau (*counter-contested*) dan alternatif cara penggunaannya media baru.

Usaha-usaha yang dikategorikan oleh Atton, sebagai berikut:

1. Isi/content, radikal politis, radikal sosial dan kulural, nilai-nilai berita (*news value*);
2. Bentuk grafis (*form-graphic*), bahasa visual, presentasi yang bervariasi dan bahan-bahan; yang bersifat estetis,;
3. Beberapa inovasi/penyesuaian reprografis-penggunaan mimegraf, IBM, *offset litho*, alat-alat photocopi;

4. Berbagai tanggungjawab, peran, dan relasi sosial bagi para pembaca dan penulis, kolektif, dan organisasi profesional jurnalis, cetak, dan publikasi.
5. Proses-proses transformasi komunikasi link-link jaringan yang bersifat horisontal²⁴.

Model media tersebut, merupakan media multi wajah (*multi-faceted*) dan tiap-tiap enam dimensi atau lebih sedikit radikal dalam konteks menyeluruh, contoh channel media organisasi yang radikal tetapi konservatif yang diperuntukkan audience; media ini hanya dapat menggunakan jurnalis yang berkualitas tetapi dalam sebuah strukturnya tidak hirarkis dan inklusif. Di samping itu, model media ini dapat memproduksi isi yang bersifat *counter-cultural content* (pertarungan kultural-politis dan ideologis) secara konsisten.

Pertanyaan yang muncul, apa citizen journalism? Menurut *National Association of Citizen Journalists* (NACJ) membuat pembeda di antara jurnalis aksidental, advokasi jurnalis warga dan jurnalis warga. Menurut NACJ²⁵, hanya karena seseorang menggunakan kamera *phone cell* untuk memfoto suatu kejadian dan kemudian meng-*upload* ke *flickr* atau *face book*, kegiatan tersebut tidak membuat orang menjadi seorang jurnalis warga (*citizen journalist*), karena beberapa individu memiliki sebuah *blog* atau *blowiat* tentang dirinya atau materi yang disukainya, hal tersebut tidak berarti orang tersebut sebagai seorang jurnalis warga.

- a. Mengimajinasikan Publik sebagai aktor sosial dan ruang sosial.

Dalam masyarakat dunia kontemporer, mereka memiliki dua hal terkait dengan kehadiran di segala tempat dan kehadiran yang tidak terlihat (*invisible*). Di dalam keduanya terdapat bentuk yang sangat bersemangat, sebagai penguasa rakyat tentang demokrasi dan menuntut para konsumen dari tempat pasar, sehingga tuntutan publik menjadi diakui, dilayani, dijadikan

²⁴ Chris Atton,(2002). *Alternative Media*, London: Sage, h.27.

²⁵ Ross, R & Cormier, SC. 2010. *Handbook for citizen journalists*. Denver, Colorado: National Association of Citizen Journalists (NACJ), h. 57.

tempat kosultasi, diberi informasi dan dihargai. Sementara mereka tidak memegang kekuasaan, dan publik sadar hanya dapat melakukan klaim-klaim legitimasi dengan berbicara atas namanya dan melakukan atas kepentingannya²⁶. Publik menjadi fakta essensial dari suatu landscap sosial, karenanya akan membebani pemahaman kita untuk mengatakan secara pasti apa mereka itu (*what they are?*)²⁷. Publik adalah suatu tempat, anda tidak bisa berjalan ke sana, dan ia adalah sekelompok masyarakat atau sekelompok yang luas dari masyarakat tetapi anda tidak bisa menemui mereka. Tempat dan masyarakat adalah contoh yang familiar, tetapi anda mengenal mereka dengan baik, anda tidak akan pernah melihat mereka dan melakukan mereka, dan bahkan anda salah seorang bagian dari mereka (*you are one of them*)²⁸.

Publik harus diciptakan, setidaknya dibayangkan, sebelum dikenalnya. Penguasa publik menggambarkan publik sebagai seorang phantom dari suatu emajinasi sosial, atau suatu gagasan atau postulat²⁹. Tidak pernah bertemu dalam suatu tempat dan berbicara dengan satu suara, publik tidak dapat merepresentasikan diri mereka. Publik menjadi mati untuk direpresentasikan. Membayangkan publik adalah terus menerus disulitkan oleh ambivalen perannya sebagai aktor dan sekaligus pentas. Sebagai aktor, publik membagi masyarakat membuat kemasyarakatan, walaupun kita akan melihat, tidak penting semua masyarakat untuk semua waktu. Sebagai pentas (permainan), publik mendasar pada suatu zona keterbukaan dan transparansi sosial sebagai pihak yang memiliki privacy dan bahan material. Tetapi gagasan ruang publik dipersulit oleh suatu perbedaan di antara dunia resmi dari persoalan-persoalan publik yang cenderung dibuat aturan pada tingkat

²⁶ Coleman, Stephen & Ross, Karen.,(2010) *The Media and Public: Them and Us in Media Discourse*, Wley-UK:Blac Well, h.8.

²⁷ Michael Warner (2002) *Publics and Counterpublics*. Cambridge, MA: MIT Press: 65.

²⁸ John Hartley (2007) *Television Truths: Forms of Knowledge in Popular Culture*. Malden, MA: Blackwell: 1.

²⁹ Clive Barnett (2003) *Culture and Democracy: Media, Space and Representation*. Edinburgh: Edinburgh University Press: 4.

tinggi, dan ruang publik bersifat *inclusive* berkenaan setiap orang dengan dunia nyata yang dilekatkannya dalam kehidupan rutin setiap hari³⁰.

Beberapa implikasi yang sangat penting bagi bentuk-bentuk komunitarian komunikasi jurnalistik untuk warga³¹, mencakup:

- a) Warga mampu melakukan akses yang lebih besar;
- b) Suara-suara komunitas lebih ditekankan pada penggunaan sejarah berita;
- c) Terbuka ruang lebar bagi warga untuk memiliki dan mengoperasikan platform media;
- d) Pemilik komunitas lebih besar otoritasnya berkaitan dengan sejarah berita;
- e) Mendorong kompetisi elitis dan media komersial;
- f) Kesempatan untuk bereksperimen dengan pendekatan lebih partisipatif untuk kepentingan produksi jurnalistik.

b. Perhatian Publik

Publik terkadang lebih jauh dikonseptualisasikan sebagai sumber ancaman di dalam tempat kerumunan/kelompok, dan bahkan pendapat yang melalui proses polling. Suatu cara untuk memikirkan publik sebagai penerima pesan yang aktif (*active recipient of message*). Atau juga sering didefinisikan sebagai bentuk alamat yang tidak pasti dari tindakan komunikatif untuk diorientasikan pada universalitas³². Oleh karena dapat dipahami sebagai sesuatu yang tidak tetap, realitas obyektif, tetapi sebagai cara untuk berbicara dengan pihak asing yang butuh berbagi di ruang sosial. Secara eksistensial, publik memang tidak dapat dikenali secara pasti, atau lebih pada wujud orang

³⁰ Coleman, Stephen & Ross, Karen.,(2010) *The Media and Public*...h. 9.

³¹ Fackson Banda,(n.y), *Citizen Journalism & Democracy*....h. 9.

³² Clive Barnett (2003) *Culture and Democracy: Media, Space*....h. 5.

asing, namun pada waktu lain akan dapat dikenali, melalui posisi diterminan obyektif dalam struktur sosial atau eksistensi material³³.

Pertimbangan bagi publik dapat diprediksi, karenanya harapan tentang apa yang publik sukai kemudian dibentuk. Sebagaimana harapan yang tak pernah ditemui, karena publik secara aktual dan historis dapat menjadi kreatif dan kadang keras kepala dalam menentukan kehidupan duniawinya. Bahkan formasi gagasan antisipatif Warner sebagai fungsi puitis wacana publik "*poetic function of publics discourse*"³⁴, misal warga bangsa "nation-state" mengalamatkan pada warga negaranya bukan hanya sebagai publik, tetapi sebagai publik yang dapat diterima secara normatif dan dicirikan secara berbeda³⁵.

Berpikir tentang publik sebagai produk sirkulasi sosial, membantu pertarungan gagasan-gagasan publik merupakan entitas pre-existing yang diteliti. Hal tersebut membantu kita untuk memikirkan publik sebagai kehadiran yang termediasi, yang muncul, atropia, dan mereformasi dalam jawaban bermacam-macam pesan aturan yang terkait dengan masa depan.

c. Publik sebagai ruang sosial

Ruang sosial "*social space*" mendasarkan pada aktor historis dalam istilah publik, juga menggambarkan serangkaian relasi spasial di dalam tindakan sosial yang berpindah-pindah tempat. Ruang sosial tidak akan dipahami dalam pengertian tipologis yang sempit, sebagai demensi tempat secara fisik, tetapi sebagai konfigurasi sosial yang terdiri dari hubungan-hubungan praktis dan pengalaman secara interaktif³⁶. Beberapa konfigurasi spasial menaturalisasikan relasi-relasi sosial dengan mentransformasi bentuk-

³³ Michael Warner (2002) *Publics and Counterpublics*...h. 88.

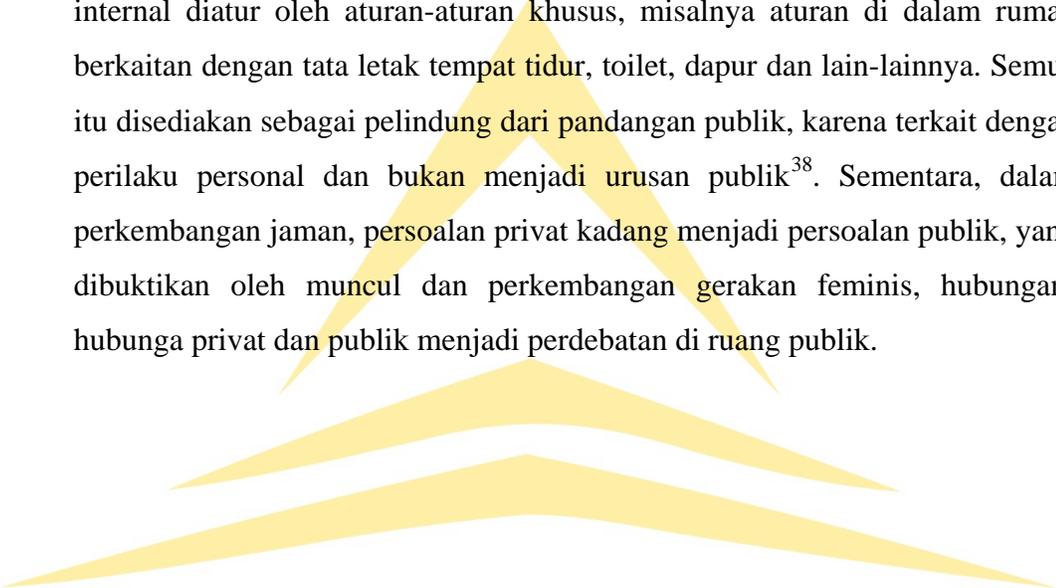
³⁴ Ibid, h. 114

³⁵ Coleman, Stephen & Ross, Karen.,(2010) *The Media and Public*...h.18.

³⁶ Ibid, h. 22.

bentuk kontingen terhadap suatu *landscape* permanen yang *immutable* (dapat menumbuhkan imunitas) dari pada membuka kontestasi. Dalam perspektif teori sosial, dengan konsep "*spatial turn*". Lebih jauh menurut Foucault, ruang sosial sebagai sesuatu yang melekat dengan design dan manajemen ruang yang membentuk instrumen kontrol sosial³⁷. Oleh karena, ada dua konsep kunci yang harus diteliti, yaitu ruang publik dan ruang privat.

Ruang privat adalah tertutup, tidak terlihat bagi *outsider*, dan secara internal diatur oleh aturan-aturan khusus, misalnya aturan di dalam rumah berkaitan dengan tata letak tempat tidur, toilet, dapur dan lain-lainnya. Semua itu disediakan sebagai pelindung dari pandangan publik, karena terkait dengan perilaku personal dan bukan menjadi urusan publik³⁸. Sementara, dalam perkembangan jaman, persoalan privat kadang menjadi persoalan publik, yang dibuktikan oleh muncul dan perkembangan gerakan feminis, hubungan-hubungan privat dan publik menjadi perdebatan di ruang publik.



IAIN PURWOKERTO

³⁷ M. Foucault (2002) *Archaeology of Knowledge*. New York and London:Routledge.

³⁸ Coleman, Stephen & Ross, Karen.,(2010) *The Media and Public...h.22*.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Dalam sejarah filsafat, Francis Bacon (1561-1625) dan August Comte (1798-1857) meletakkan dasar pengetahuan empiris-analitis melalui rasionalisme dan empiris, merupakan bentuk upaya pembersihan pengetahuan dari kepentingan atau dengan kata lain fakta objektif sebagai pengetahuan yang sah (Hardiman, 2009). Dalam proses dialektika ilmu pengetahuan alam dan sosial, semangat positivisme menjadi tuntutan bersikap positivistik. Sejalan dengan itu, positivistik memiliki tiga pengandaian yang saling berkaitan. Pertama, prosedur metodologis ilmu alam diimplementasikan dalam ruang lingkup ilmu sosial. Kedua, hasil penelitian diformulasikan dalam bentuk hukum-hukum sebagaimana terjadi di ilmu alam. Ketiga, adanya penyediaan pengetahuan yang bersifat teknis. Menurut Giddens (1975) sebagaimana yang dikutip Nugroho (2004), keduanya, yaitu ilmu alam dan sosial merupakan ilmu yang bersifat netral atau bebas nilai.

Perkembangan selanjutnya, penerapan metode-metode alam pada kenyataan sosial mengandung permasalahan. Hal ini disebabkan oleh pandangan tentang aktifitas-aktifitas individu tidak dapat diposisikan ke dalam bingkai hukum-hukum tetap. Kemudian lahirlah perdebatan tentang metode-metode (*methodenstreit*), begitu juga ilmuwan ilmu-ilmu budaya para penganut Neo-Kantianisme berpendirian, bahwa ilmu-ilmu budaya menghasilkan relevansi nilai¹. Artinya, gejala sosial memiliki makna budaya

¹ Hardiman., Budi F. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.

yang hanya bisa dimengerti oleh pemahaman konteks budaya dari objek yang diteliti² (Nugroho, 2004).

Dalam konteks pemikiran mazhab Frankfurt yang sering dikenal sebagai "Teori Kritis" lebih menekankan pada sifat dialektis, sebagaimana diungkapkan oleh Geuss (1981) dengan cara dua macam kritik. Pertama, kritik transendental dengan cara menemukan syarat-syarat pengetahuan dalam diri subjek. Kedua, kritik imanen dengan menemukan kondisi sosiohistoris dalam konteks tertentu yang mempengaruhi pengetahuan manusia (Hardiman, 2009).

Penelitian ini memusatkan kajian pada penelitian kepustakaan yang sifatnya analitis wacana kritis berdasarkan kajian teks. Dalam hal ini konten sebagai issue dalam ruang Kompasiana.

Pendekatan paradigma intepretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel karena objek tersebut dilihat sebagai sesuatu yang dinamis, hasil konstruksi pemikiran, dan interpretasi gejala yg diamati. Di samping itu, pemaknaan tersebut melihat sesuatu gejala dalam ranah pergumulan konflik atau bersifat ideologis-politis³. Artinya pendekatan ini berusaha melihat perbedaan atas issue demokrasi, sejauhmana pihak-pihak yang berkepentingan bertarung dalam konteks ekonomi politik, politik parlemen, dan politik global.

B. Data dan Sumber Data

1) Sumber Primer

Sumber data dalam penelitian ini, adalah konten atau issue-issue persoalan politik dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perundang-undangan, lembaga negara yang berkaitan dengan kepentingan

² Heru Nugroho, Heru., 2004. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

³ Storey, *Culture Studies*....h. 3.

bangsa atau *nation-state (civil society)*. Oleh karena itu, sumber data primernya adalah naskah teks yang dikontestasikan oleh admin Kompasania selama perkembangan tahun 2015.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Misalnya pendapat tokoh tentang poligami yang dipublikasikan melalui majalah, internet, ataupun tabloid.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah metode baca. Metode baca digunakan untuk mengidentifikasi data yang berupa teks naratif sebagai konten yang diwacanakan oleh Kompasania.

1) Metode Baca

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menempatkan konten sebagai issue utama yang diperdebatkan. Data dikumpulkan dengan metode baca, yaitu membaca secara cermat narasi teks komentar dalam laman Kompasania. Hasil baca data kemudian dipindahkan ke dalam tabel. Selanjutnya data diklasifikasikan menurut aspek-aspek yang menjadi sarana pendukung wacana. Kriteria yang dijadikan pedoman untuk merepresentasikan resistensi (politik ataupun ideologi) wacana demokrasi,

2) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi data pendukung atau sekunder, meliputi, pendapat tokoh tentang konsep demokrasi yang dipublikasikan melalui surat kabar majalah ataupun tabloid, dan internet(jurnal) dan lain-lain.

D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini menempatkan media *Online* atau media sosial sebagai ranah pertarungan ideologi dan politik bagi beberapa pihak yang berkepentingan terkait dalam ranah kekuasaan, sehingga diharapkan dapat memetakan pertarungan pihak dominan dan subordinat dalam wacana tersebut.

Penelitian ini dilakukan di media sosial Kompasiana.Com. Kepentingan pemilihan media ini didasarkan pada argumentasi, bahwa media sosial sebagai media warga sebagai instrumen penyampaian/sharing gagasan, pendapat, maupun pertemanan dalam komunitas warga.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian merupakan keseluruhan masalah yang dibahas dalam penelitian sedangkan subjek penelitian yaitu yang membahas objek tersebut. Oleh karena itu, objek adalah segala sesuatu yang diteliti sedangkan subjek adalah peneliti yang membicarakan dan membahas objek meskipun, sejauh ini oleh paradigma penelitian kuantitatif, subjek dipahami sebagai sumber data yang meliputi narasumber atau informan yang memberikan informasi tentang objek penelitian. Namun, dalam penelitian kualitatif sumber data semacam itu disebut sebagai objek karena ia merupakan satu komponen yang harus diteliti untuk mendapatkan informasi secara akurat tentang objek penelitian. Memperlakukan sumber data sebagai objek akan dapat memberikan otoritas penuh kepada setiap peneliti untuk melakukan intepretasi dalam mengkonstruksi suatu pemahaman dan bahkan intervensi subjektif sebagai bentuk pemihakan terhadap objek yang dikaji (Denzin, 1994:105-116). Berdasarkan pandangan tersebut, objek dibagi menjadi dua macam: objek primer/formal, yaitu persoalan utama yang diteliti dan objek sekunder/material, yaitu sumber data.

Dengan demikian, objek penelitian ini meliputi objek primer, yaitu representasi resistensi kuasa dalam demokrasi yang diwacanakan oleh media sosial Kompasiana.com, dan objek sekunder, yaitu sumber data lainnya yaitu dari media sosial lain yang mewacanakan issue-isue yang sama. Sedangkan subjeknya adalah peneliti sendiri.

F. Sumber Data

Menurut Arikunto (2010:172), sumber data terdiri atas tiga kelompok, yaitu orang, tempat, dan kertas. Orang adalah sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban dari wawancara, baik secara lisan maupun tertulis. Tempat yaitu sumber data yang bisa menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan gerak seperti ruangan, alat-alat perlengkapan, dan aktivitas. Adapun kertas yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, atau simbol lainnya yang biasanya berupa dokumentasi, brosur, dan sebagainya. Penggunaan ketiga sumber data ini tergantung pada teknik penelitian yang digunakan peneliti.

Sumber data penelitian ini meliputi ketiga kelompok tersebut, yaitu Highlight atau konten yang diwanakan oleh Kompasiana.com yang berkaitan dengan issue-issue demokrasi di Indonesia dalam bulan Agustus -September. Sumber data kedua, yaitu kelompok kertas, adalah dokumen, brosur, dan publikasi lainnya tentang objek penelitian, baik yang dikeluarkan oleh media *online* yang diteliti maupun oleh orang atau kelompok (lembaga) lain, baik dalam bentuk tercetak maupun non-cetak (*digital*).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough⁴ (2001), analisis ini berusaha menghubungkan teks yang mikro dengan konteks sosial yang makro. Fokus perhatiannya, adalah bahasa ditempatkan sebagai praktik sosial. Untuk melihat ideologi penulis wacana digunakan analisis bahasa secara menyeluruh, karena bahasa dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk tindakan dalam hubungannya dengan dialektika dengan struktur sosial. Oleh karena, pusat perhatian analisis ini, adalah bagaimana bahasa diproduksi dan direproduksi dari relasi sosial dan konteks sosial⁵.

Model yang dibangun oleh Fairclough (1992) dalam analisisnya di samping dimensi linguistik, adalah ia mengintegrasikan pemikiran sosial, politik menjadi bagian integral dari perubahan sosial. Pemakaian bahasa dalam wacana merupakan bentuk praktik sosial yang memiliki implikasi, antara lain wacana merupakan suatu bentuk tindakan dan bentuk representasi dalam memandang realitas sosial, dan hubungan interaksional antara wacana dan struktur sosial. Wacana dibagi dengan struktur sosial, kelas, perjuangan sosial dan relasi sosial berhubungan relasi-relasi tertentu . Kemudian ia memperkenalkan tiga tahap untuk melakukan penelitian dengan metode analisis kritis. Tiga tahap tersebut, adalah deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi dalam menghubungkan teks pada level mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, yakni *socio-cultural practice*.

Ada tiga dimensi yang dilakukan Fairclough dalam analisisnya, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural, sebagai berikut:

a. Teks

⁴ Fairclough, Norman., 2001, *Language and Power*, England: Pearson Education Limited.

⁵ Lihat Sulhan Chakim, 2014. *Interseksionalitas Kuasa Perempuan: Analisis Wacana Kritis Relasi Gender dan Kelas Sosial dalam Poligami Studi Novel Ayat-Ayat Cinta*, Purwokerto: STAIN Press.

Level pertama berupa teks dianalisis secara linguistik, atau deskripsi perhatiannya pada beberapa aspek struktur bahasa, yaitu aspek kosa kata dan gramatika, dan struktur tekstual.

b. Praktik wacana

Level kedua berupa Praktik wacana, atau intepretasi⁶, berkaitan dengan proses produksi, distribusi dan konsumsi teks⁷. Menurut Fairclough, fitur level kedua ini mengekapulasi prinsip-prinsip penting dalam wacana kritis, yang mana analisis teks tidak dapat dipisahkan (ekslusi) dari praktik institusi dan wacana pada domain suatu teks, adalah terikat. Atas dasar kerangka kerja ini, wilayah ini akan menunjukkan interdiskursivitas atau tatanan wacana poligami, yaitu untuk mengkaji bagaimana teks novel diproduksi, direkontekstualisasi, dan berdialog dengan dengan teks lain atau intertekstual.

Pada level praktik wacana ini ada yang dihilangkan, yaitu aspek distribusi dan konsumsi teks dengan lebih memfokuskan pada aspek bagaimana suatu teks diproduksi, sebagaimana Fairclough (1995a) melakukan pengabaian tersebut. Selanjutnya, Tahap ini, oleh Fairclough (2001) teks akan dilihat keterkaitannya sebagai konteks situasional dan intertekstual yang mencakup enam dimensi yang berhubungan secara paralel.

c. Praktik sosiokultural

Level ketiga berupa praktik sosiokultural, atau *eksplanasi* (Fairclough, 2001). Tujuan tahap ini untuk mendiskripsikan diskursus sebagai proses sosial, menjelaskan bagaimana diskursus menjadi diterminan bagi struktur sosial, dan efek reproduksi diskursus berupa mempertahankan atau mengubahnya. Dengan demikian, fokus pada level ini, adalah relasi kekuasaan, proses dan praktik sosial

⁶ Ibid.

⁷ Nourman Fairclough 1995a. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, London: Longman

yang difokuskan pada proses dan praktik usaha sosial. Artinya pengamatan diskursus merupakan bagian dari proses usaha sosial yang berkaitan dengan relasi kekuasaan.

Asumsi bahwa diskursus memiliki ketentuan-ketentuan dan efek pada semua level di atas, meskipun level *societal* dan *institutional* akan secara jelas lebih membedakan tipe-tipe institusi diskursus, dan apapun diskursus dibentuk oleh relasi kekuasaan institusi dan kekuasaan masyarakat, serta memberikan kontribusi pada usaha/perjuangan institusi dan masyarakat.



BAB IV

GAMBARAN UMUM KOMPASIANA

A. Sejarah Berdiri Kompasiana

Seorang wartawan senior Budiarto Shambazy pernah mengusulkan nama “Kompasiana” sebagai media sosial untuk wartawan dan warga yang tayang secara *online*. Namun demikian, latar belakang berdirinya tidak lepas dari pengetahuan dan familiaritas penggunaan blog, yang pada waktu itu banyak jurnalis atau wartawan belum akrab dengan blog dan dunia maya. Salah seorang jurnalis Kompas yang sudah akrab dan menggagas blog Kompas pada tahun 2005 adalah Pepih Nugroho, karena kepiawaian tentang dunia cyber lalu ia dipindah tugaskan ke Kompas.com¹.

Pada tanggal 1 September 2008, Kompasiana online masih terbatas pada jurnalis Kompas dan mengembangkan menjadi blog sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, Kompasiana dikembangkan dengan para jurnalis Harian Kompas dan Kompas Gramedia, serta para tamu penulis yang mencakup ahli politik, pakar ekonomi, budaya, artis dan lain-lainnya. Dalam lingkup terbatas ini, awal mula para blogger semangat dan antusias untuk ikut ngeblog, namun demikian lambat laun semakin berkurang, dan kondisi ini menuntut pengembangan baru yang lebih luas².

Perkembangan selanjutnya, Kompasiana mengalami metamorfosis yang sebelumnya dalam jaringan terbatas, pada 22 oktober 2008 berubah menjadi blog sosial yang menyediakan ruang dalam konten dan format baru dan bisa diakses oleh semua warga, atau dengan kata lain Kompasiana menjadi *social media* baru³.

Disain Format pelayanan yang ditawarkan oleh Kompasiana mencakup beberapa hal, yaitu gambar video, photo, ataupun artikel tulisan berbagai bidang pengetahuan maupun artistik. Kompasiana sebagai media sosial warga sangat terbuka untuk diakses dan merupakan ruang artikulasi gagasan, ataupun pertarungan ide, reportase peristiwa dan lain sebagainya.

¹Pepih Nugroho, Kompasiana Etalase Warga Biasa, h.4

² Ibid, h 21-22.

³ <http://www.Kompasiana.com> about, didownload pada 10 Agustus 2015.

Partisipasi aktif atau keterlibatan warga dalam ruang sosial yang disediakan Kompasiana merupakan upaya dan kontribusi dalam penguatan dan pengembangan demokratisasi semua lapisan atau *civil society* dengan menempatkan warga sebagai sumber dalam bingkai media *citizen journalism*. Ruang terbuka ini menjadi tanggungjawab warga sebagai warga yang hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Setiap Kompasianer yang menuliskan atau memposting gagasan, atau tanggapan suatu bidang atau pemberitaan yang dialami oleh dirinya sendiri merupakan tanggung jawab dirinya sendiri dan pihak lembaga Kompasiana tidak ikut bertanggungjawab. Hal ini sudah merupakan ketentuan atau prosedur yang diberikan oleh Kompasiana, karena warga merupakan jurnalis lepas dalam Kompasiana.

Di samping itu, hubungan interaksi antar warga (kompasianer) disediakan oleh Kompasiana melalui fitur interaktif dan email. Pertemanan ini merupakan bentuk pelayanan antar anggotanya. Secara individual bisa saling tukar informasi ataupun gagasan-gagasan warga kompasianer dan dapat terbangunnya komunitas yang tidak berbentuk tetapi terus berkembang cepat.

Prosedur penggunaan Kompasiana harus melalui pendaftaran ke alamat www.kompasiana.com/registrasi. Bagi warga yang berkeinginan untuk terlibat aktif, setelah registrasi ia akan mendapatkan blog pribadi dengan alamat <http://kompasiana.com/namapengguna>. Sarana dan prosedur ini terbangunnya komunitas di ruang maya yang bermanfaat untuk pertemanan ataupun jaringan sosial. Oleh karena bagi mereka yang bukan anggota, hanya sebatas membaca konten atau isi sebagai warga pasif tanpa adanya komunikasi timbal balik.

Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Kompasiana antara lain: Asosiasi penerbit dan surat kabar di Singapura WANIFRA⁴ memberikan penghargaan *Asian Digital Media Award (ADMA)* pada tahun 2010 sebagai pemenang *Best in Digital Content Award User Generated Content*. Dan juga dari perusahaan induknya (Kompas Gramedia), Kompasiana merupakan unit bisnis yang paling innovative.

⁴ Jubile Interprise, (2011), *Panduan Praktis Ngeblog di Kompasiana*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindi, h 2-3

B. Logo Kompasiana



Gambar.1

Sumber. www.kompasiana.com, diakses 22 Agustus 2015

C. Struktur Admin Kompasiana

Struktur tim kerja Kompasiana ini terdiri dari⁵:

Managing Director : 1. Taufik H. Mihardja; 2. Edi Taslim

Editor in Chief : Pepih Nugroho

Editor : Iskandar Zurkanaen

Web Engineer : Air Langga Tirtawardana

Web Designer : Maulana Mikael

Marketing Communication : Okky Brahma Arimurti

Admin Staff : 1. Nurullah; 2. Roberto Januar Setyabudi; 3. Siti Khoirunnisa

D. Produk Layanan Fitur Kompasiana

1. Jurnalisme Warga

Program “menulis” merupakan platform Kompasiana, yang mana sebagai wadah untuk *sharing* ide atau gagasan, dan bahkan pertemanan dalam bingkai media sosial. Dalam hal ini, ada tiga kegiatan menulis, yaitu pertama, laporan versi warga. Kedua, menulis opini versi warga, dan ketiga, fiksi warga.

Program jurnalisme warga dalam Kompasiana, meliputi: Topik Pilihan, *Head Line*, *highlight*, *Trending Articles*, dan *Featured Article*). Orientasi program ini antara lain:

a. Artikel pilihan

Artikel pilihan merupakan rubrik program layanan yang disediakan Kompasiana, yang mana para Kompasianer menulis gagasan yang up to

⁵ www.kompasiana.com, diakses 22 Agustus 2015

date. Sitem yang digunakan adalah tulisan Kompasianer ini tersusun berdasarkan indeks pilihan

b. *Headline*

Headline adalah berita utama yang merupakan opini atau reportase utama yang dibuat oleh warga atau Kompasianer.

c. *Highlight*

Highlgiht merupakan bentuk tulisan artikel yang dibuat oleh warga yang aktual, memiliki nilai manfaat, dan memberikan nilai inspiratif bagi sesama warga. Namun artikel-artikel dalam *highlight* ini masih diseleksi untuk dijadikan dalam tema besarnya, yaitu menjadi *Headline*.

d. *Tren di Geogle*

Trending articles adalah bentuk tulisan yang ditulis oleh komunitas Kompasianer yang membahas tentang issue-issue aktual, uniequ penuh resistensi atau menjadi bagian polemik di lingkungan warga maupun negara. Tulisan ini mencapai ratusan dan bahkan lenih dari itu, serta ditempatkan pada program atau balong *Trending articles*.

e. *Featured article*

Featured article adalah artikel tentang suatu topik atau issue yang telah dimuat satu atau dua tahun yang lalu, kemudian diangkat kembali atau publis kembali karena terdapat relevansi dengan topik atau issue terkini.

2. *Freez*

Freez merupakan produk layanan program Kompasiana yang dibangun atas dasar konsep *hibrida* dari beberapa jurnalistik, yaitu harian Kompas print dan Kompasiana. Dan program *freez* ini terbit atau publis setiap hari rabu, dan akan dijadikan majalah digital.

3. *Topik Pilihan*

Topik pilihan merupakan program layanan yang disediakan Kompasiana, yang mana para Kompasianer menulis tentang peristiwa atau opini terbaru dan *up to date*. Sitem yang digunakan adalah sistem tagging, setiap opini atau laporan diberi tag pada kolom khusus.

E. Beberapa Istilah dalam Kompasiana

Dalam penyajian layanan online dan berbagai fitur, Kompasiana memiliki beberapa istilah yang sudah familiar oleh para pengguna, antara lain:

1. Kompas.com (www.kompas.com) adalah sebuah portal news yang selalu *update* dalam ruang atau space. Hak cipta dan merek dagangnya dimiliki oleh PT Kompas Cyber Media, salah satu unit usaha Kompas Gramedia.
2. Kompasiana (www.kompasiana.com) adalah suatu portal yang menyediakan konten berasal dari dan dikelola oleh pengguna warga/citizen (*User Generated-Content*). Kompasiana adalah Media sosial Warga yang berada dalam management Grup Digital Kompas Gramedia.
4. Kompasianer merupakan istilah yang digunakan sebagai Pengguna Kompasiana, salah satu komunitas internet yang menjadi anggota dengan melakukan registrasi. Selanjutnya setelah teregistrasi mereka memiliki akun Kompasiana dengan alamat <http://kompasiana.com/namapengguna>. Kompasianer atau pengguna tersebut memperoleh akses fitur dan layanan Kompasiana.
5. *Administrator* atau admin adalah pihak pengelola fitur-fitur dan layanan. Admin bertugas memonitoring konten, mengelola tulisan yang dikirim ke berbagai fitur yang ada, meverifikasi akun, dan melakukan komunikasi dengan para anggota warga. Admin memiliki hak menghapus Konten yang melanggar ketentuan, menyunting konten, mengatur waktu penayangan konten, melayangkan peringatan, dan memblokir akun.
6. Konten adalah materi yang dipost-kan ke dalam sistem dan dipublis-kan di situs Kompasiana, baik berupa file photo, tulisan, dan musik, bentuk grafik, video, serta komentar maupun gagasa-gagasan, dan bahkan kritik sosial. Konten juga dapat berupa materi yang diunduh, di-*linked*-kan atau dilekatkan (*embed*) ke dalam materi yang dipublis oleh Kompasiana.
7. Pembaca/reader adalah setiap anggota masyarakat online yang mengakses situs Kompasiana. Dalam hal ini, bagi pembaca memiliki keterbatasan, karena ia tidak memiliki akun di Kompasiana. Konsekuensinya, tidak bisa menulis dan menempatkan konten apapun, termasuk komentar dan peringkat (*rating*), di Kompasiana.

F. Peta Wacana Demokrasi dalam Kompasiana

Kompasiana sebagai ruang sosial yang dijadikan oleh warga sebagai media *sharing* dan *connecting*. Namun salah satu yang terpenting adalah media ini tidak lepas dari pemilik modal. Kompas Gramedia sebagai induk perusahaan Kompasiana, tidak lepas dari kepentingan ekspansi bisnis di dunia maya dan global. Perubahan ekonomi inilah yang menjadi penyebab terjadinya proses-proses sekularisasi terus bertahan dan ditopang oleh kekuatan pasar global⁶. Hubungan antar negara, masyarakat dan intitusi keagamaan, kelembagaan negara atau parlemen, dan dunia bisnis inilah yang terjadi hubungan *avis vs a vis* atau yang sering diistilahkan proses demokratisasi.

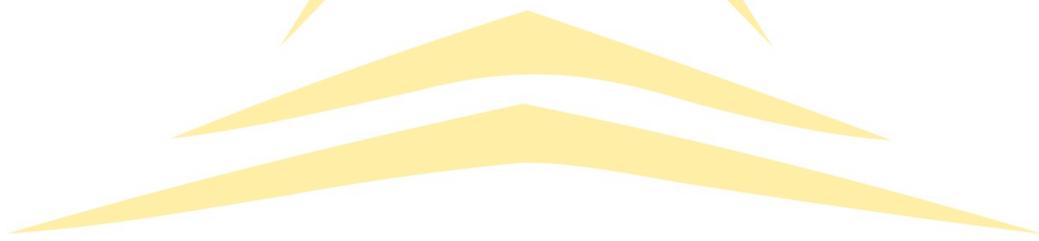
Peta wacana demokrasi yang disuguhkan dalam space topik pilihan, sebagai berikut:

POLITIK WARGA	POLITIK PEMERINTAHAN	EKONOMI POLITIK	POLITIK PARLEMEN
-Bagaimana Caranya Dana Desa Selamat? (23/8/2015)	-Jokowi, Dibalik Konflik Yusuf Kalla-Rizal Ramli (22/8/2015)	-Ketika Cengkeraman Asing Menguasai Negara (7/5/2015)	- Setya Novanto dan Fadli Zon, Terjebak dalam Sang Rahwana PDIP (7/9/2015)
-Demo Buruh 10 Agustus 2015 Resahkan Kalangan Dunia Usaha (9/8/2015)	-Cara Menghindari Krisis Ekonomi RAPBN 2016, Target Pajak Naik, Beban Rakyat Bertambah	- Virus Strong USD Vaksin Perekonomian Indonesia (8/9/2015)	- Zulkifli Hasan Sang Maestro, Menarik Amin Rais Bergabung dengan Jokowi! (4/9/2015)
- Pak Jokowi Selamatkan Warga (7/9/2015)	- Tjipta Lesmana: Kalla Minta Jokowi Pecat Rizal atau Mundur dan Gaduh Politik (23/8/2015)	-Kondisi Perekonomian Indonesia (7/9/2015)	-Alasan Kapolri Kepada DPR, Pencopotan Komjen Budi Waseso, Dan Harapan Kepada Komjen Anang Iskandar.(7/9/2015)
- Kedaulatan Pangan Terancam Gagal? (Bagian 1)(7/9/2015)	- Reward dari Joko Widodo vs Punishment dari Presiden, untuk Serapan Anggaran	- dollar meningkat indonesia kebingungan (7/9/2015)	
-Pentingnya Memiliki Asuransi Jiwa	- Reward dari Joko Widodo vs	- Rupiah	-Apakah Rakyat Indonesia Menyukai Setya

⁶ Guy Ben-Porat, *Globalization, Secularization and Relegion- Changing Terrain?*, European University Institute, 2008.

<p>(7/9/2015)</p>	<p>Punishment dari Presiden, untuk Serapan Anggaran</p> <p>-Perselingkuhan Sepuluh Crane” Bareskrim Geledah Pelindo II, Lino Tantang Jokowi!</p> <p>-Paloh Merelakan Tedjo, Strategi NasDem, dan Sukacita Megawati</p> <p>- Jurus Sakti Jokowi Tiga Belas Penakluk Lautan</p> <p>-Bareskrim: Pengeledahan Ruang H Lulung dengan Ruang RJ Lino, Wajah Pemberantasan Korupsi di Indonesia</p> <p>- Ini Langkah Menteri Susi Untuk Sejahterakan Nelayan</p> <p>Kabareskrim Komjen Budi Waseso Dicapot? Terlalu Berani Terjebak dalam Sindikat Istana?</p> <p>- Presiden Jokowi Waspada Rini Soemarno, Kemungkinan Langkah Politik Tahap II (17/8/2015)</p> <p>- Usia 70 Tahun Merdeka, Jokowi</p>	<p>Melemah, Eksportir dan Industri Lokal Tersenyum (7/9/2015)</p> <p>-Ini Salah Siapa? (8/9/2015)</p> <p>-Menko (diduga keliru) Menuding Mafia Listrik (8/9/2015)</p>	<p>Novanto? (7/9/2015)</p> <p>-Pansel KPK Meloloskan 10 Capim Bermasalah Masuk Seleksi Tahap Akhir, Ada Apa? (4/8/2015)</p> <p>- Pidato Kenegaraan 15 Agustus 2015 Jokowi, Diperlukan Keberanian Kejujuran dan Kekuatan (7/8/2015)</p> <p>-“Dementia” Penampakan Ketua/Wakil DPR, dan Untung/Rugi bagi Donald Trump? (7/9/2015)</p>
-------------------	--	---	---

	<p>Tetap Optimis Karena Tidak Punya Musuh (18/8/2015)</p> <p>- Tugas Khusus Rizal Ramli Tangani "Dwell Time" 3-4 Hari, Wah Berat, Ujian atau Hukuman! (19/8/2015)</p> <p>- SBY Memoles Diri, Menggurui, Jokowi Tersenyum (31/8/2015)</p>		
--	--	--	--



IAIN PURWOKERTO

BAB V

RESISTENSI WACANA DEMOKRASI DI INDONESIA

Pada Bab iii dijelaskan tentang peta wacana dalam topik pilihan Kompasiana. Peta wacana tersebut dipetakan menjadi 4(empat) tema besar, yaitu politik warga (*political citizens*), politik pemerintahan (*political goverment of policy*), politik parlemen, dan ekonomi politik. Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang digunakan untuk membahas Bab v ini, adalah pendekatan resistensi kontingensi yang dibangun oleh media sosial. Argumen ini adalah berasumsi bahwa teknologi informasi berperan/memberikan kontribusi pada perkembangan komunikasi politik, khususnya berpengaruh pada deliberasi demokrasi dan pembuatan keputusan yang baik¹. Kerangka kerja pendekatan ini menempatkan peta-peta wacana sebagai subjek yang dianalisis pada tataran konflik dan pendukungnya. Selanjutnya praktik wacana kritis ini akan dibahas melalui tiga tahapan, yaitu deskripsi, interpretasi dan eksplanasi atau yang sering disebut dengan praktik sosio-kultural.

A. Praktik wacana politik warga

Kompasiana sebagai media baru atau media sosial yang berbasis jurnalisme warga memberikan ruang selebar-lebarnya terhadap warga untuk memberikan gagasan ataupun peristiwa aktual. Warga sebagai audience yang aktif dan kritis mampu memberikan kontribusi pada produksi isi dengan tanpa motif ekonomi. Kesadaran dan ketulusan warga untuk berbagi dan berhubungan satu sama lain. Proses inilah secara terus menerus menjadi sebuah komunitas yang dibayangkan, walaupun dalam dunia maya. Dalam konteks kehidupan demokrasi pada era Jokowi-Jusuf Kalla atau era kabinet kerja, wacana demokrasi menjadi penting untuk melihat realitas keinginan warga-bangsa dalam sebuah wacana dan juga melihat bagaimana negara hadir di tengah-tengah kehidupan berdemokrasi.

¹ Philippe J. Maarek and Gadi W., *Political Communication in A New Era: A Cross-national Perpsective*, London: Routledge, h. 42.

1. Anggaran dana desa

Dalam konteks politik warga salah satu issue yang sedang hangat dan menjadi harapan masyarakat adalah bagaimana memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sebagaimana wacana tentang "Bagaimana caranya dana desa selamat?". Deskripsi wacana ini, adalah:

"Penyaluran dana desa tahap pertama oleh Pemerintahan Jokowi di tahun ini sebesar Rp 8,28 triliun yang ditransfer ke pemerintah kabupaten dan kota, sudah hampir mencapai 100 persen. Hingga 30 Juni 2015 lalu, ada 420 kabupaten/kota atau 99,77 persen yang sudah menerima transfer dana desa tahap I. Sisanya, ada 14 kabupaten/kota yang belum mendapatkannya. Untuk tahun ini, dana desa dialokasikan Rp 20,7 triliun untuk 74,093 desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menegaskan, dana desa harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permendesa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015"

Undang-Undang Desa No.6 tahun 2014 mengamanatkan pembangunan pedesaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dana desa yang bersumber dari anggaran APBN ini mengundang kekhawatiran banyak pihak, terkait dengan rawan tindak korupsi di tingkat pemerintah daerah dan desa. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa masih minim. Oleh karena itu, pertanyaannya siapa sajakah yang terlibat untuk pengawasannya?

Kompasiana sebagai institusi jurnalisme warga ikut memberikan kontribusi terkait program yang diamanatkan oleh Undang-Undang pedesaan tersebut. Sebagaimana gagasan pengawasan yang harus dilibatkan dalam pengawalan dana desa, antara lain:

- a. Pengawasan internal. Pengawasan ini, adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang meliputi: rukun warga pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Mereka memberikan pengawasan rutin, juga harus mempunyai keberanian untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang apabila ditengarai terjadi penyimpangan dalam pengelolaannya dana desa tersebut.
- b. Pengawasan eksternal. Pengawasan ini diberikan oleh KPK, Polri dan lembaga-lembaga pengawasan independen lainnya. Pengawasaan yang diberikan oleh KPK dalam pencegahan tindak pidana korupsi misalnya dalam bentuk pendidikan anti korupsi yang diberikan kepada aparat desa

maupun Badan Permusyawaratan desa. Dengan kontribusi pengawasan yang bersifat pencegahan ini diharapkan lebih efektif hasilnya ketimbang KPK hanya fokus kepada penindakan.

- c. Pengawasan Media. Peran media sosial berkontribusi memberikan pengawasan dan pengawalan. Sehingga dalam perjalanannya dana desa selamat sampai tujuan; untuk pembangunan masyarakat desa menuju kehidupan sejahtera adil dan ber peradaban.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun akhir 2014 pada kisaran 8-10 persen dari jumlah penduduk. Dua hal yang menjadi program strategisnya, adalah Melengkapi dan menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak masyarakat miskin, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat; dan Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah²

Kekhawatiran dan kecurigaan ini mengundang resisten bagi pelaksana program yang didanai oleh dana desa. Meminjam istilah yang digunakan oleh Foucault³ merupakan instrumen kontrol sosial. Dalam hal ini ketiga lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), KPK, kejaksaan dan Kepolisian, serta media massa tersebut di atas, sebagai alat kontrol pelaksanaan dana desa di seluruh Indonesia. Kontrol sosial merupakan salah satu praktik demokrasi baik di wilayah parlemen dan pemerintahan pusat maupun di daerah.

Instrumen kontrol sosial atas program pedesaan dapat dijadikan strategi oleh ketiga lembaga tersebut. Satu sisi Bagi lembaga Media Massa merupakan lembaga yang bekerja mengopinikan penggunaan dana desa yang sangat fantastis dan rawan penyelewengan di tingkat daerah. Penyebaran informasi dengan jangkauan dan proses difusi ini dapat berpengaruh pada kognisi sosial atas "penggunaan dana desa/APBN". Artinya pengetahuan aturan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan program yang dibiayai oleh APBN ini

² . Profile Analisis Kemiskinan Nasional 2013

³ M. Foucault (2002) *Archaeology...*

berpengaruh pada tekanan-tekanan bagi pelaksana program. Apa yang diwacanakan oleh Kompasiana ” Bagaimana caranya dana desa selamat?” dengan bentuk kalimat tanya ini, jika dipahami sebagai praktik sosial, oleh Bourdieu memberikan implikasi pada pertarungan politis. Artinya terdapat tarik menarik kepentingan atas sumber dana yang ada, tentunya tidak lepas dari mereka yang duduk di lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif di tingkat daerah adalah DPRD II yang terdiri dari berbagai fraksi kepartaian yang secara non formal akan berpengaruh pada perjuangan masing-masing partai untuk memperoleh/mendapatkan simpati rakyat.

Simpati rakyat atas agen-agen yang ada di partai tersebut akan relevan dengan trio konsep Bourdieu, sejauh mana kepentingan agen untuk mengumpulkan modalitas dalam ranah publik untuk merealisasikan kepentingannya yang dalam hal ini disebut dengan modal simbolik⁴. Oleh karena setiap individu dalam semua partai berusaha untuk mengumpulkan simpati, perhatian, dan kepercayaan masyarakat pemilih dan menjadi investasi jangka panjang atau yang disebut *cultural power*⁵. Kekuasaan yang diperoleh atau dibangun melalui interaksi praktik-praktik sosial dalam waktu yang relatif lama.

Dalam konteks, Kompasiana sebagai media warga terkait dengan wacana tentang ”penyelamatan dana desa” ruang interaksi yang diberikan oleh komunitas dalam memberikan pendapat dan respon atas wacana tersebut, setidaknya dapat dipahami bahwa Kompasiana telah melakukan sosialisasi ideologis pada penyadaran semua komponen untuk mengawal program dana desa. Di sisi lain kekuatan politis menunjuk pada pengawasan internal, eksternal dan media atas pelaksanaan program yang diundangkannya.

⁴ Pierre Bourdieu, 1991. *Language and Symbolic Power*, terj. Gino Raymond and Matthew Adamson, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press

⁵ Marry Talbot, 2007. *Media Discourse : Representation and Interaction*, Edernburgh University Press:Edernburgh, h. 15.

2. Demo buruh

Buruh dalam dunia industri merupakan kelas bawah. Pandangan kapitalis tentang buruh dianggap sebagai salah satu alat produksi menjadi pihak yang lemah dan dikalahkan dengan berbagai aturan perusahaan yang memenjarakannya. fungsi tersebut menurut Marx dan Engels terakumulasi arus (*circuit*) modalitas yang berbeda, yang mencakup keuangan, sirkulasi komoditas, pertukaran uang terkait dengan karyawan dalam proses produksi menjadi basis ekonomi masyarakat⁶. Aktifitas buruh merupakan salah satu dari representasi yang memberikan ilustrasi tentang kelas loyal dan oposisi terhadap kelas yang berkuasa.

Berdemo merupakan aktualisasi masyarakat, ketika aspirasinya tersumbat, baik oleh aturan, kebijakan maupun ketidakberdayaan mereka. Sebagaimana wacana ” Demo Buruh 10 Agustus 2015 Resahkan Kalangan Dunia Usaha”

”.... Dua ribu buruh dari wilayah Jabotabek akan menggelar demonstrasi pada tiga lokasi di Jakarta, Senin 10 Agustus 2015. Adapun demonstrasi perdana akan digelar di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 hingga 13.00 WIB... **Pertama:** Menuntut Pertanggungjawaban Manajemen PT Mandom Cibitung terhadap 25 korban meninggal dunia dan 32 luka berat. **Kedua:** Agar KPK mengusut kasus suap dan korupsi di PT Indofood. **Ketiga:** Pembubaran BPJS Kesehatan karena dianggap gagal melayani jaminan kesehatan untuk rakyat miskin dan kaum buruh. **Keempat:** Menolak intervensi dan campur tangan kepentingan politik terhadap panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK”.

Selain wacana jaminan kesehatan dan kematian yang dikelola BPJS, isue tersebut terhubungan isue tentang ” Pentingnya Memiliki Asuransi Jiwa”, walaupun beberapa aspek lain yang tidak ada kepentingan buruh terhadap industri ikut diwacanakannya. Asuransi jiwa merupakan jaminan hidup bagi buruh di mana mereka bekerja dengan jaminan kesehatan, hidup dan bahkan jiwa. Berkaitan dengan tuntutan di atas, menjadi bukti kepentingan buruh

⁶ Meenakshi Gigi Durham dan Douglas M. Keller, 2006. *Media and Culture Studies*
Keywords, Blacwell Publishing: Australia, h. 9.

sebagai kelas bawah dan kelas dieksploitasi oleh perlakuan dan kebijakan kelompok yang berkuasa. Kondisi ini menggambarkan dan membuktikan bahwa buruh teropresif, jika meminjam pemikiran Hepper⁷ bahwa hak-hak mereka terinjak-injak baik hak individu maupun kelompok. Issue tentang jaminan kesehatan ini sesungguhnya dalam konteks primer bagi kepentingan buruh, tetapi dalam opini yang dibangun adalah melibatkan kepentingan lain, yaitu "pengusutan kasus suap dan korupsi di PT Indofood, dan Menolak intervensi dan campur tangan kepentingan politik terhadap panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK".

Apa yang diwacanakan ini oleh buruh mencoba untuk membuat issue yang isinya berbeda, atau bertujuan untuk mencari dukungan massa lain guna kepentingan untuk terbangunnya kekuatan lain yang sama. Beberapa issue yang berbeda ini bisa dipahami sebagai "common sense of people" sebagaimana Hepper⁸, merupakan nalar-logis masyarakat untuk mencari dukungan kekuatan lain. Masyarakat buruh sebagai masyarakat yang dapat diimajinasikan sejauh mana relasi struktur sosialnya dan berbagai kepentingan ideologisnya selalu berkeinginan untuk survival.

Dalam konteks sosio-kultur, media sosial lain juga menurunkan wacana yang sama dengan tuntutan yang berbeda, yaitu:

"Menurut mereka gembar-gembor fasilitas jaminan sosial gratis untuk pekerja buruh dan rakyat yang diatur dalam UU No 24 tahun 2011 adalah sebuah kebohongan dan gerakan pengkhianatan terhadap kaum buruh. "Ini jelas bahwa semakin memberatkan buruh, masa untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan wajib membayar iuran," kata Ketua DPD SPN Jabar, Iwan Kusmawan, di sela-sela aksi, Rabu"⁹.

Undang-Undang No. 24 tahun 2011 merupakan instrumen yang mengikat kedua belah pihak, baik buruh maupun pengusaha sebagai pemilik

⁷ Metin Heper, "A Democratic-Conservative" in Turkey, di dalam Ibrahim Abu Rabi', *Contemporary Islamic Thought*, , 2006. H.346

⁸ Ibid.

⁹ Merdeka.Com. *Tolak BPJS, Seribuan Buruh Tolak Gedung Sate*, diakses Senin, 21 September 2015

perusahaan. Salah satu praktik demokrasi adalah seberapa besar lembaga yudikatif membuat UU, khususnya berkaitan dengan relasi buruh dan industri. Namun demikian, secara faktual buruh masih merasa dibohongi dan dikhianati dalam tataran implementasi di lingkup kehidupan industri. Aktualisasi demo ini, sesungguhnya merupakan bentuk penolakan atau resistensi kaum buruh atas implementasi UU tersebut terkait iuran kesehatan yang dianggap berbeda dengan semangat UU tersebut. Menurut Talisse, Tindakan pemerintah dan warga yang terkendala/terhambat oleh serangkaian peraturan-peraturan spesifik dalam suatu konstitusi publik menjadi bumerang bagi kedua belah pihak¹⁰.

Tanggapan lain tentang demo buruh direspon negatif,

“efek samping dari penyampaian aspirasi yang kelewat heboh itu justru menurunkan kesejahteraan pekerja itu sendiri. Mari kita telaah... Berapa banyak pekerja yang kemarin datang terlambat ke kantor karena kondisi jalan macet parah? Berapa banyak pekerja yang akhirnya terpaksa bolos karena sulitnya mencapai kantor? Berapa banyak pekerja yang akhirnya kehilangan uang makan, atau bahkan upah mereka dibayar setengah hari karena datang terlambat? Berapa banyak pekerja yang akhirnya kesulitan pulang kemarin malam karena tidak ada kendaraan umum yang lewat akibat efek demo? Berapa banyak pekerja transportasi yang juga kesulitan mendapat penumpang karena mereka tertahan di satu titik dalam waktu berjam-jam?”

Ketidaksetujuan sebagaimana pendapat di atas, menunjukkan setiap aksi yang seolah-olah memperjuangkan kelompok tertindas dianggap sebagai pemihakan kaum lemah, tetapi secara faktual implikasinya bersifat negatif. Aksi perjuangan kaum buruh untuk menyuarakan peningkatan kesejahteraan kaum buruh, direspon negatif oleh berbagai kalangan, misalnya para pegawai PNS, dan lembaga-lembaga lain yang terkena dampaknya. Bagi yang merespon berbeda menghendaki kenyamanan dalam transportasi menuju lembaganya dan penurunan pendapatnya. Dengan demikian kepentingan dan tanggapan berbeda ini merupakan pergumulan konflik politis dalam kelas yang sama. ”Demonstrasi memang salah satu fungsi kontrol tatanan politik atau sosial

¹⁰ Robert B. Talisse, *Democracy and Moral Conflict*, New York: Cambridge University Press, h. 11.

dalam ilmu sosiologi. Namun caranya yang saya kurang sepaham. Saya tidak tahu apa sih manfaat demo besar-besaran kemarin? Selain masalah disana-sini. Keluhan para pekerja lainnya akan kondisi yang setiap tahun selalu ramai dan mengganggu. Lalu bagaimana dengan kabar Anda kemarin? Terkena dampak”. Oleh karena situasi ini, ”secara empiris melahirkan konflik kepentingan yang menyebabkan ketidakseimbangan atau ketimpangan sosial, karena terjadi pola-pola institusionalisasi pengendalian yang timpang dan distribusi nilai guna yang berbeda”¹¹. Secara teoritis juga dipahami, bahwa

”Demonstrasi memang salah satu fungsi kontrol tatanan politik atau sosial dalam ilmu sosiologi. Namun caranya yang saya kurang sepaham. Saya tidak tahu apa sih manfaat demo besar-besaran kemarin? Selain masalah disana-sini. Keluhan para pekerja lainnya akan kondisi yang setiap tahun selalu ramai dan mengganggu. Lalu bagaimana dengan kabar Anda kemarin? Terkena dampak”.

3. Selamatkan warga

Wacana yang dibangun oleh Kompasiana adalah ”Pak Jokowi, selamatkan Indonesia”

”Sejak Pak Jokowi menjadi presiden, beliau ini sangat gemar mencabut subsidi, baik BBM maupun Listrik. Alasan klasik pertama, yang menikmati subsidi bukan rakyat miskin tetapi pemilik mobil dan pemilik rumah berdaya listrik 1200Watt yang menunjuk pada golongan menengah. Alasan klasik kedua, pencabutan subsidi akan mengefisienkan APBN sehingga dana subsidi bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang selama ini dianggap tertinggal”.

Wacana di atas menjelaskan tentang kebijakan presiden yang tidak populis dan dianggap tidak pro rakyat. Gambaran presiden sebagai pengelola negara dan pemerintahan yang diharapkan oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah tentang usaha-usahanya untuk memakmurkan mereka. Di sisi lain,

¹¹ Dill, Bonnie Thornton., and Zambrana, Ruth Enid.,2009. *Emerging Intersections: Race, Class, and Gender in Theory, policy, and Practice*, New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press.Lihat Sulkhana Chakim, *Interseksionalitas Perempuan.....*, h. 23-24.

praktik pencabutan subsidi BBM dan Listrik, keduanya merupakan sumber energi yang tidak lepas terkait dengan efisiensi penghematan APBN. Namun, pada sisi lain, argumentasi klasik yang oleh diopinikan bahwa subsidi hanya menguntungkan kalangan bourgeois menengah ke atas.

Dalam konteks, di atas bahwa masyarakat merasakan betapa beratnya dan bahayanya atas kebijakan pencabutan subsidi tersebut untuk jangka panjang. Kompetisi pemilik modal secara individual membuat kepentingan khusus yang tampak sebagai kepentingan umum pada level negara, Hicel¹² (1975: 151), “*resides the actual relevance of bourgeois fractioning.*” Friksi dalam hal ini dapat dipahami adanya disintegrasi dalam semua lapisan masyarakat. Kenyataan inilah masyarakat bawah selalu dikorbankan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Sebagai bukti daya beli masyarakat menurun, PHK besar besaran, dan ditambah lagi penurunan kurs rupiah terhadap \$ USA dan menghantui ekonomi negara. Statemen dalam bentuk perintah “...selamatkan Indonesia” ini merupakan tuntutan segera untuk benar-benar bekerja kabinet Jokowi-JK.

Penelitian Nikensari (2003) mengenai dampak Letter Of Intent antara IMF dan Indonesia (1998) pada butir pencabutan subsidi energi yang imbasnya berupa kenaikan harga energi menyatakan:

“Pengurangan jumlah subsidi membawa dampak multiplier yang sangat luas pada perekonomian, termasuk pada PDB. Hal ini ditunjukkan oleh hasil simulasi dengan model INDECGE dengan tahun dasar 1998, yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek adanya kenaikan harga energi masih memberikan dampak positif pada kenaikan PDB Sektoral maupun PDB Pengeluaran dengan prosentase yang menurun, akan tetapi dalam jangka panjang kenaikan harga energi akan memberikan dampak negative pada PDB semua sektor, kecuali pada sektor yang masih ada subsidiya,....”

¹² Lihat Hesmondhalgh, David. 2010. “*User-generated Content, Free Labour and the Cultural Industries*”, dalam Jurnal *Ephemera*, Vol. 10, No. 3/4, hal. 267-284.

Penelitian Vinita (2012) mengenai dampak Letter Of Intent antara IMF dan Indonesia (1998) pada butir liberalisasi sektor pangan dan dampaknya pada sektor pertanian khususnya beras menyatakan: "Liberalisasi sektor beras hanya menguntungkan bulog sebagai importir serta Thailand dan Vietnam sebagai negara produsen beras".

Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah tentang pencabutan subsidi dinilai mengorbankan warga negaranya dan mencemaskan kalangan pengusaha yang bergerak industri berbasis impor. Kedua penelitian di atas memberikan bukti pemerintah sangat pelit atau berbasis irit untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks sosio- kultur, atas penilaian kebijakan presiden paket 1 dan 2 dirasakan oleh kalangan pengusaha menimbulkan waswas/kekhawatiran yang besar atau dengan kata lain "ekspektasi pasar tidak kelihatan"¹³. Paket yang dilakukan oleh presiden ini merupakan salah satu "metode yang digunakan untuk mencapai pengambilan keputusan yang dapat berpengaruh kepada suatu kelompok masyarakat dalam situasi tertentu"¹⁴. Kecemasan kalangan usaha di satu sisi, pada sisi yang lain masyarakat bawah mendapat tekanan mulipel kompleks. Sebagaimana digambarkan diimajinasikan oleh konsep Anderson, bahwa sejauhmana dan seberapa besar PHK dilakukan oleh perusahaan, daya beli masyarakat menurun, dan melemahnya krus Rupiah terhadap mata uang asing, terutama yang paling tertekan adalah dengan US \$.

Imajinasi di atas dengan dibandingkan oleh negara lain yang berincome lebih tinggi, seperti yang disampaikan oleh Kompasianer¹⁵:

"Jika kita membandingkan layanan pemerintah antara negeri kita dengan negeri lain, kita akan merasa iri. Pelayanan umum di negeri lain sangat ramah, murah dan nyaman, ditambah lagi dengan jaminan keselamatan yang sangat memadai. Pelayanan yang disediakan pemerintah dari hasil

¹³ Purbaya Yudhi (pengamat ekonomi PT Danareksa), *Paket Kebijakan Ekonomi II Membuat Pasar Waswas*, Suara Merdeka ,21 september 2015, h. 1-7.

¹⁴ Hellen & Catta,....h. 6.

¹⁵ Wajiran, *Selamatkan Indonesia*, Kompasiana.com, diakses 25 September 2015

pembayaran pajak masyarakat benar-benar bisa dirasakan semua kalangan. Kita ambil contoh sederhana saja di Malaysia, di negara yang umurnya lebih muda dari kita ini pelayanan umumnya sangat istimewa. Pelayanan transportasi seumpamanya, infrastruktur jalan sangat bagus, ongkos transportasi sangat murah. Jika di dibandingkan dengan ongkos di negeri kita, dua kali lebih murah dari di negeri kita. Padahal, dari tingkat pendapatan perkapitanya jauh lebih tinggi mereka. “

Kondisi di atas menuntut langkah-langkah strategis pemerintah Jokowi-JK untuk bekerja sesuai dengan motonya, sebagai ”kabinet Kerja”. Ekspektasi masyarakat untuk kembali kepada peran pemerintah untuk melakukan proteksi di mana negara hadir, seperti halnya yang digagas oleh Wajiran tentang langkah-langkah yang harus di tempuh oleh pemerintahan Jokowi-JK Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas negeri ini diantaranya; ”*Pertama*, perlu dilakukan pengambilalihan aset-aset bangsa ini dari tangan asing. Gagasan Soekarno untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di negeri ini nampaknya perlu digalakan kembali. *Kedua*, pemerintah harus menggalakan produk dalam negeri. Pemerintah memiliki kewenangan mengatur segala produk yang beredar di negeri ini. *Ketiga*, masyarakat bangsa ini telah kehilangan identitas. Nilai-nilai luhur Pancasila yang ditanamkan oleh para *Founding Father* negeri ini telah luntur seiring dengan membanjirnya arus informasi yang sedemikian terbuka. *Keempat*, munculnya ormas-ormas gadungan yang saat ini menjamur di negeri ini akibat lemahnya penegakan hukum.”¹⁶ Enam langkah ini gagasan-gagasan yang dibayangkan oleh warga bangsa untuk berekspektasi tentang kemakmuran. Warga bangsa membayangkan fasilitas memadai, pelayanan murah, ramah, cepat dan tepat. Pendapatan masyarakat tinggi, sehingga akan menaikkan pertumbuhan ekonomi di semua sektor.

¹⁶ Ibid.

B. Praktik wacana politik pemerintahan

Dalam wacana politik pemerintahan yang dibangun oleh Kompasiana merilis, Jokowi, Dibalik Konflik Yusuf Kalla-Rizal Ramli”. Subtansi wacana ini adalah:

”Jokowi seorang presiden yang secara dhohir kurus kerempeng ternyata jago banget menyelesaikan masalah perseteruan tingkat tinggi antara Menko Kemaritiman Rizal Ramli dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dengan caranya yang unik Jokowi dapat menenangkan JK, sekaligus memberi penerangan kepada RR, sehingga dengan sukarela mau mendatangi Jusuf Kalla bersalam-salaman. Dan Keduanya pada akhirnya telah kembali berdamai. Dari pernyataannya, RR tidak merasa mendapat teguran dari presiden Jokowi bahkan RR mengklaim kalau Presiden sangat menyenangkan karakter dirinya, pertama karena ada kesamaan sifat dan kedua ada kesamaan jalan pikiran yang “out the box”. RR menganggap dirinya tidak sama dengan yang umum. Ia dan Pak Jokowi spesial, mempunyai kelebihan jika dibandingkan orang lain, memiliki nilai yang lebih, yang unik, dll.”

Konflik Jokowi-JK di atas menunjukkan perbedaan pandangan di tingkat pejabat pembantu presiden. Hal ini dilansir di ruang terbuka melalui berbagai media. Dalam konteks ini, banyak pihak yang menyayangkan tidak ada sistem pengendalian komunikasi dalam pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu, konflik tersebut memberikan ilustrasi, bahwa beberapa kepentingan sedang memainkan peran yang berpengaruh pada pengambilan keputusan. Kompetisi pemilik modal secara individual membuat kepentingan khusus yang tampak sebagai kepentingan umum pada level negara, Hickel (1975: 151), “*resides the actual relevance of bourgeois fractioning.*”

Wakil presiden Yusuf Kalla, seorang pengusaha besar dan tentunya, ia terlihat sekali memiliki kepentingan. Hal ini tampak pada ancaman ”keinginan untuk mundur sebagai wapres”. Ada apa sesungguhnya dibalik persteruan ini. Yusuf Kalla pemilik modal ekonomi dan politik yang cukup besar untuk dapat mempengaruhi kebijakan presidennya. Bagaimana sesungguhnya dengan mega proyek PLN, ia sangat getol mempertahankan untuk tidak merevisinya. Menurut Bourdieu, Modal atau *capital* merupakan logika yang mengendalikan

bentuk-bentuk perjuangan. Konflik Rizal dan Jusuf Kalla, keduanya sedang memperjuangkan kepentingannya dalam ranah negara di ruang publik. Pernyataan-pernyataan Rizal ini dapat dipahami sebagai strateginya untuk mendapatkan posisi sosial di ruang publik. Seharusnya Rizal membantu presiden dan sebagai pembantu harus loyal. Namun demikian, bagi Rizal yang terjadi sebaliknya, ia semakin kritis. Apa yang diperjuangkannya?

Hal tersebut tidak lepas sosok rizal ketika di luar pusaran kekuasaan, bagi Rizal di dalam kekuasaan maupun tidak, tidak menjadi halangan untuk tetap kritis. Sebagaimana ketika era SBY, sosok rizal selalu konsern dengan kritik dan saran untuk penyelamatan bangsa dan negara NKRI. Hal ini dibuktikan dengan imajinasi Kompasianer, sebagai berikut:

”Malah, saya membayangkan, bahwa betapa dahsyatnya negara ini jika kedua tokoh seperti SBY dan Rizal Ramli bisa bersatu membangun negeri ini. Tetapi sayangnya, istilah yang menyebutkan: “..jangan lihat orangnya, tetapi terimalah kebenaran dari apa yang dikatakannya” nampaknya tidak dilakukan oleh Presiden SBY terhadap kritik, ide dan saran solusi yang disodorkan oleh Rizal Ramli selama ini. Karena sekali lagi, SBY sepertinya selalu saja memandang semuanya dari kacamata politik. Akibatnya, muncul kekuatiran yang sangat berlebih-lebihan terhadap sosok Rizal Ramli. Sampai-sampai, masukan atau saran dari Rizal Ramli yang sesungguhnya dapat menjadi jalan keluar dari persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa saat ini pun akan sulit ditempuh...”

Perlawanan dari pihak Yusuf Kalla dapat dilihat dari hari berikutnya wacana yang mengancam ” Tjipta Lesmana¹⁷: Kalla Minta Jokowi Pecat Rizal atau Mundur dan Gaduh Politik”

”Tjipta Lesmana ikut mengompromi persetujuan Wapres Jusuf Kalla dengan Menko Maritim Rizal Ramli yang tengah memanas. Tjipta, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) menyebut Wakil Presiden Jusuf Kalla mengancam akan mundur jika Presiden Joko Widodo tidak mengganti Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal

¹⁷ Tjipta, *Kalla Minta Jokowi Pecat Rizal atau Mundur dan Gaduh Politik*, Kompasiana.com.

Ramli "JK mengancam (ke Jokowi) kalau Pak Rizal ini tidak dipecat, dia mau bercerai (mundur)," ujar Tjipta di Jakarta,"¹⁸

Pertarungan antara Wapres Jusuf Kalla dengan Menko maritim Rizal Ramli ini merupakan kontrol dari seorang Menko yang seharusnya tidak terjadi di tataran terbuka oleh publik sehingga dengan perbedaan pandangan ini menunjukkan sistem atau prosedur komunikasi tidak jalan atau dapat disebut dengan tersumbat. Pihak luar juga ikut terlibat, yang diwakili secara individual menjadi pendukung Menko Rizal Ramli. Dalam konteks ini, kompetisi kekuasaan yang berbeda sedang terjadi melalui proses-proses siapa yang berposisi paling dominan. Setidaknya, jika meminjam istilah Bourdieu, inkorporasi dominasi menjadi bagian yang penting dalam proses demokratisasi. Pernyataan subversif wakil presiden sebagai pihak teropresif oleh lembaga kementerian.

C. Praktik wacana ekonomi politik

Headline Kompasiana tentang ekonomi politik menempatkan dominasi asing dalam sebuah negara yang berdaulat, seperti wacana "Ketika Cengkeraman Asing Menguasai Negara". Deskripsi wacana ini, sebagai berikut:

"Di tengah *euphoria* peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60, ada peristiwa yang akan langsung berpengaruh pada negeri ini dan penduduknya, namun luput dari perhatian masyarakat. Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hasilnya berupa komitmen investasi dalam proyek infrastruktur dengan nilai yang luar biasa besar, mendekati seribu triliun.

Proyek infrastruktur tersebut berdasarkan situs Sekretariat Kabinet tidak lain adalah untuk pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandara, jalan sepanjang 1.000 km, jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangkit listrik berkapasitas 35.000 mega watt."

¹⁸ Sabtu (22/8/2015), sebagaimana dilansir Kompas.com (22/8/2015).

Wacana di atas menyetengahkan upaya pemerintahan Jokowi-JK untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menggait investasi asing di Indonesia. Dalam konteks tersebut, selaras dengan situasi pertumbuhan ekonomi yang melambat yang akan mempengaruhi di berbagai sektor, seperti wacana tentang "Kondisi Perekonomian Indonesia" Deskripsi wacana ini mempertanyakan fondasi perekonomian negara, sebagaimana yang diungkapkan Kompasiana "Saat ini Indonesia dilanda dengan Dinamika perekonomian yang belum jelas. Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Banyak yang mempertanyakan, mengapa hal ini dapat terjadi ??" Kekuasaan demokrasi adalah mengkalkulasi kekuatan, dan beberapa kelompok adalah yang secara integral pada beberapa teknologi yang memberikan efek bagi demokrasi sebagai suatu serangkaian partikular mekanisme peraturan¹⁹.

Mekanisme peraturan yang berlaku di sebuah negara akan mempengaruhi besarnya penanaman modal asing /masuknya investasi dalam mega proyek negara. Hal ini juga tidak lepas dari beberapa gebrakan tentang peninjauan ulang ratusan aturan untuk direvisi dan upaya kemudahan ijin proyek-proyek negara. Strategi pemerintahan Jokowi-JK untuk menanamkan kepercayaan Penanaman Modal Asing ini merupakan upaya pemberian hak-hak untuk bergantung dan pertukaran properti, privasi, perlindungan yang sama di bawah hukum, menjadi proses kewajiban²⁰.

Upaya pertemuan Jokowi dengan "Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Hasilnya berupa komitmen investasi dalam proyek infrastruktur dengan nilai yang luar biasa besar, mendekati seribu trilyun". Apa yang dilakukan presiden Jokowi ini dapat menjadi argumentasi tentang kesuksesan politik luar negeri bukan sebagai politik identitas, tetapi bagaimana sesungguhnya publik melihat sebagai politik

¹⁹ Nikolas Rose (1999) *The Powers of Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press: 200.

²⁰ Ibid.

konstruksi²¹. Media mengkonstruksikan bahwa usaha luar biasa presiden Jokowi sukses membangun kepercayaan di tingkat Asia-Afrika. Kesuksesan ini menjadi modal politik dan ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini dapat digunakan untuk membangun legitimasi di tingkat elit negara, otoritas dan memperkuat kekuasaan presiden atau yang disebut dengan "...to consolidate the ruling elite's political legitimacy"²².

Di lain pihak pengaruh global berdampak terhadap perekonomian negara berkembang, seperti wacana tentang "dollar meningkat Indonesia kebingungan", deskripsi wacana ini memberikan penjelasan kepada publik ketika alat transaksi suatu negara didominasi oleh mata uang asing (dollar USA), maka akan berpengaruh pada tingkat inflasi, depresiasi dan lain-lain, sebagaimana deskripsi di bawah ini:

"Saya akan menjelaskan dampak yang terjadi di Indonesia pada saat dollar meningkat kita sering mendengarkan kabar tentang kenaikan dolar yang mengakibatkan mata uang Indonesia menurun, yang sering dimaknai sebagai pelemahan nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kurs mata uang adalah perbandingan nilai mata uang yang digunakan oleh tiap negara dalam perdagangan internasional. Tujuan dari masing-masing negara adalah terciptanya kestabilan nilai terhadap mata uang negara lain. Nah, apa saja dampak kenaikan dolar itu terhadap kehidupan ekonomi kita?"

Mata uang, bahasa dan simbol-simbol lain suatu negara merupakan identitas nasionalisme. Mata uang rupiah merupakan salah satu identitas negara yang memberikan jaminan bahwa alat tukar ini berlaku dan dijadikan nilai dalam setiap perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Menurut Anderson (1991:110) perangkat nasionalisme atau yang disebut "*official nationalism*" dikonstruksikan melalui formasi kultural dan artifact-artifact yang berupa narasi ideologis, musik, sastra, drama, film, bendera, lagu kebangsaan dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan ideologi dan politik suatu negara.

²¹ Gary D. Rawnsley & Ming-Yeh T. Rawnsley, 2003. *Political Communications in Greater China: The Constructions and Reflection of Identity*, London: RoutledgeCurzon, h. 62

²² Ibid.

Pelemahan nilai rupiah terhadap dollar USA yang berdampak di berbagai bidang bagi masyarakat dan negara, berakibat pada pelemahan legitimacy politik elit. Wacana ini memberikan ruang bagi para oposisi untuk melakukan perlawanan tentang ketidak berdayaan politik elit Jokowi-JK. Sejauh mana wacana *self-legitimacy*²³ dapat digunakan untuk mengkonsolidasi kekuasaan elite dan memarginalkan wacana kelompok oposisi. Pada prinsipnya, dalam sistem pemerintahan presidensial tidak ada kelompok oposisi, namun kenyataannya, praktik oposisional sangat kental ketika terjadi koalisi antar partai di parlemen.

Dalam konteks Pelemahan nilai rupiah tidak serta merta semua pihak dan sektor melemah atau terkena imbas ketidak berdayaan, melainkan pihak lain/dalam negeri yang bergerak perdagangan ekspor meraup keuntungan, seperti wacana tentang "Rupiah Melemah, Eksportir dan Industri Lokal Tersenyum". Deskripsi wacana ini, adalah:

"Rupiah semakin melemah menjadi perbincangan yang hangat akhir-akhir ini. Banyak berbagai sektor ekonomi yang merasakan dampak melemahnya rupiah, bukan hanya itu, mulai banyak masyarakat yang mempertanyakan kinerja Presiden Jokowi. Berbagai spekulasi penyebab melemahnya Rupiah pun bermunculan, dari konflik di Yunani, Konflik yang terjadi antara korea selatan dan korea utara, kenaikan suku bunga di Amerika, hingga depresiasi Yuan di Cina. Tetapi dibalik masyarakat yang menderita akibat melemahnya rupiah, ada sebagian masyarakat yang tersenyum, siapa mereka? Ya, pihak eksportirlah yang merasakan dampak positif melemahnya rupiah, kenapa demikian? Akibat melemahnya rupiah menyebabkan barang ekspor menjadi lebih baik, sehingga menyebabkan pendapatan mereka yang bertambah".

Peristiwa pelemahan rupiah dan pihak yang diuntungkan menjadi delimitatis, khususnya sebagian besar masyarakat, pengusaha maupun industri berbasis impor. Banyak industri mem-PHK buruh dan bahkan gulung tikar. Dalam kondisi ini, banyak pihak mempertanyakan kinerja pemerintah, tetapi di

²³ Benedict Anderson, 1991. *Imagined Communities: Reflections on The Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso, h. 110.

sisi lain pemerintah mengkambing hitamkan efek global, khususnya kekuatan negara adi daya USA.

Ilustrasi wacana di atas menjelaskan bahwa pihak oposisi atau partai di luar Indonesia Hebat melakukan delegitimasi dengan cara mempertanyakan "kinerja Jokowi-JK". Selain itu argumentasi mereka didukung dengan dampak pelemahan di bidang ekonomi, seperti banyaknya PHK dan industri gulung tikar dan lain-lainnya.

Dalam kesempatan yang lain diwacanakan oleh Kompasiana tentang "Ini Salah Siapa?"

Diskrepsi tentang wacana di atas, adalah:

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi hasil buminya entah kemana. Negeri ini katanya negeri hukum, tapi rakyat kecil yang selalu dihukum". Mungkin kata-kata ini pernah kalian dengar di beberapa kesempatan. Ini hanyalah sepenggal lirik lagu yang di ubah oleh orang lain sebagai ekspresi atas kekecewaannya pada bangsa ini. Terdengar konyol, tapi realita dan faktanya tidak bisa dibantah.

Negeri kita tercinta, Indonesia, sedang mengalami salah satu krisis moneter yang cukup besar. Sudah sejak 1998 bangsa ini tidak mengalami pelemahan nilai mata uang sampai "separah" ini. Mungkin, orang banyak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa sampai kita mengalami salah satu krisis yang cukup parah ini?"

Semua penghuni negara NKRI ini membayangkan kemakmuran dan kemelaratan. Kemakmuran disimbolisasikan dengan "*Orang bilang tanah kita tanah surga, tapi hasil buminya entah kemana. Negeri ini katanya negeri hukum, tapi rakyat kecil yang selalu dihukum"*. Kemakmuran menurut Anderson, merupakan tujuan sebuah negara yang selalu dibayangkan oleh warga negara, setiap orang yang hidup di dunia. Kekayaan negara yang melimpah ini digunakan oleh masyarakat dari dan untuk masyarakat. Praktik sosial didasarkan sejauhmana modalitas dikuasai dan didistribusikan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Boudieu, trio konsepnya adalah kemampuan mengelola modal dalam

berkompetisi dengan para investor sebagai pemegang modal terbanyak. Kondisi yang ada sebagai penguasanya adalah mereka yang memiliki investasi terbesar.

Dengan demikian, negara yang kaya sumberdaya alam ini sudah dikuasai negara pemegang modal. Faktualitas ketidak berdayaan negara sebagai pemegang otoritas untuk hadir sebagai pelindung bukan kenyataan, tetapi sesuatu yang dibayangkan, atau yang disebut oleh Marx merupakan kesadaran palsu. Artinya kemakmuran dan perlindungan pemerintah tidak pernah hadir sebagai pemegang kendalai kekuasaan, tetapi yang hadir sebaliknya, yaitu kemiskinan atau kemelaratan warga bangsa dan ketidak berdayaan negara.

D. Praktik Wacana Politik Parlemen

Wacana tentang sepak terjang anggota DPR RI tentang ” Setya Novanto dan Fadli Zon, Terjebak dalam Sang Rahwana PDIP”

Deskripsi wacananya adalah:

”Belum juga mereda sejak huru-hara panas yang mendera Istana, karena manuver 3B, Badrodi Budi dan Budi sebagai bagian dari orang-orang Mega dan PDIP, reaksi keras dengan sangat manis dibuat muncul dari kader PDIP di DPR terkait pencopotan Budi Waseso dari Kabareskrim beberapa hari yang lalu. Kini muncul suasana panas baru akibat begitu banyaknya kehebohan terutama yang dihembuskan oleh politisi PDIP di DPR melampiaskan kritiknya yang keras terhadap Fadli Zon dan Setya Novanto berkenaan dengan terjadinya peristiwa kehadiran mereka berdua dan beberapa anggota DPR lainnya dalam jumpa pers dengan Kandidat calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump”

Wacana kompasiana di atas mengilustrasikan situasi parlemen yang sarat kepentingan dan konflik antar koalisi. Pada kesempatan lain kelompok PDIP dengan kasus yang cukup menghebohkan tentang pencopotan Budi Waseso terkait sepak terjang yang dianggap gegabah dan berani. Sepak

terjang Budi Waseso dianggap membahayakan lingkaran kekuasaan PDIP, ia berakhir dengan tugas barunya.

Wacana pencopotan Komjen Budi Waseso, tentang "Alasan Kapolri Kepada DPR, Pencopotan Komjen Budi Waseso, Dan Harapan Kepada Komjen Anang Iskandar".

"Tinggal menunggu waktu Kapolri bakalan dipanggil DPR untuk dimintai keterangan dan penjelasannya terkait pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kabareskrim. Oleh Jokowi, Buwas dipercaya untuk memegang jabatan baru sebagai Kepala BNN, dibawah koordinasi langsung Presiden. Banyak yang mengisukan pencopotan Budi Waseso karena desakan dari pihak-pihak tertentu yang merasa diganggu sepakterjangnya dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara. Sehingga berakibat buruk terhadap stabilitas ekonomi Indonesia".

Dalam konteks yang berbeda pertarungan terjadi dengan memposisikan lawan politik PDIP pada posisi yang lemah dan dianggap inskonstitusional atas sepak terjang Setyo Novanto. Setidaknya bagaimana konstruksi media menempatkan Setyo Novanto dan Fadli pada posisi yang lemah. Kedua proses tersebut memposisikan publik sebagai klaim-klaim legitimacy tanpa kekuasaan dan berbicara hanya atas nama kepentingan mereka²⁴. Fakta publik dalam ruang sosial akan menjadi beban pemahaman atau sering juga disebut kegelisahan warga bangsa atas perilaku para elit pemerintahan dan parlemen.

Bagaimana opini masyarakat Indonesia tentang sepak terjang Setyo Novanto dan Fadli Zon, " Apakah Rakyat Indonesia Menyukai Setya Novanto?". Berikut ini deskripsinya:

"Jika kita memperhatikan video yang merekam peristiwa di Trump Tower di Fifth Avenue, New York, Rabu, 3 September lalu, saat bakal calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump memperkenalkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR Indonesia yang bikin heboh seluruh Indonesia itu, terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya

²⁴ Coleman, Stephen & Ross, Karen.,(2010) *The Media and Public....*, Wley-UK:Blac Well, h.8.

Trump sudah selesai dengan pidatonya di acara konferensi pers dalam rangka kampanye pencalonan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat itu”.

Beberapa karakteristik negara adi daya USA menghegemoni dunia, salah satunya negara Indonesia sebagai negara berkembang dan negara yang didominasinya. Hal ini dibuktikan oleh situasi ekonomi Indonesia yang mudah dipengaruhinya, salah satunya adalah pelemahan rupiah yang sangat menakutkan semua pihak, khususnya kalangan industri berbasis impor. Media memprovokasi reaksi negatif kondisi tersebut. Himbauan presiden tentang penggunaan rupiah bagi kalangan usaha juga tidak mempan bagi penguatan mata uang rupiah, usaha membangun nasionalisme atau yang sering disebut *official nasionalism*²⁵ dijadikan isyuenya tidak berefek positif.

Sepak terjang Fadli dan Setyo Novanto ini bisa dipahami sebagai upaya manuver jangkan panjang bagi hubungan dengan Trump manakala ia sukses menjadi presiden. Fakta ini memberikan pemahaman bahwa hegemoni negara adi daya tersebut sangat menghegemoni dunia²⁶.

Manuver Amin Rais dalam meramaikan dan memperkuat partainya di parlemen dengan melakukan koalisi pemerintahan , seperti wacana ”Zulkifli Hasan Sang Maestro, Menarik Amin Rais Bergabung dengan Jokowi!”

Deskripsi wacana di atas, adalah:

”Partai Amanat Nasional resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. Itu disampaikan Ketua Umum partai berlambang matahari itu, Zulkifli Hasan, usai bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Rabu 2 September 2015. Turut hadir adalah Sekretaris Jenderal PAN, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PAN Soetrisno Bachir, dan Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai mediator pertemuan tersebut”.

²⁵ B. Anderson, 1991. *Imagined Communities*,... h. 110.

²⁶ Gary D. Rawnsley & Ming-Yeh T. Rawnsley, 2003. *Political Communications in Greater China*...h.42.

Kompasiana mengkonstruksikan PAN bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK menjadi suatu atraksi politis yang dapat berdampak buruk pada hubungan koalisi Merah Putih. Proses dukungan ini diinisiasi oleh Zulkifli Hasan sebagai komandan DPR RI dan sekjen PAN, serta Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir. Dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK bukan KIB. Sikap dan dukungan ini terbatas pada pemerintahan yang memberikan pemahaman pada modalitas politis pada basis kekuasaan, menurut Bourdieu ranah ini dijadikan proses perjuangan dan strategi untuk dekat dengan sumber kekuasaan. Selanjutnya sharing apa yang dijanjikan oleh Jokowi-JK?

Pertanyaan tersebut menuntut jawaban tentang seberapa besar konsensus PAN kepada pemerintahan Jokowi-JK. Dalam hal ini, konstruksi yang dibangun oleh Kompasiana, adalah pandangan dan penyebaran informasi yang mengarah pada pemahaman umum dan arah kelompok yang ditargetkannya, meminjam istilah Clifts²⁷, adanya kebutuhan konsensus dan *"position from starts"*.

Beberapa wacana yang dibangun oleh Kompasiana memberikan pemahaman bahwa Kompasiana sebagai media berbasis internet dapat memberikan konstruksi pada cara-cara kelompok atau organisasi membangun tindakan kolektif, koalisi-koalisi lintas nasional, komunikasi politik dan beradaptasi dengan ekonomi global. Dan juga membantu anggota baru dalam organisasi, dan memperkuat solidaritas antar kelompok organisasi.

²⁷ Clifts, 1998. In Philippe J. Maarek and Gadi W., *Political Communication in A New Era....*, h.50.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari rumusan masalah dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kompasiana sebagai media baru (*New Media*) dan dijadikan sebagai jurnalisme warga dengan memberikan ruang warga sebagai jurnalis dan sekaligus sesuai dengan karakteristik sebagai citizen journalist. Sebagaimana Kompasiana mengedukasi warga melalui sikap Kompasiana melalui wacana resistensi kuasa tentang demokrasi yang dikonstruksikan oleh Kompasiana.com dalam empat peta wacana yaitu, politik warga, politik pemerintahan, dan politik ekonomi, serta politik parlemen. Proses resistensi politik warga dalam berdemokrasi berangkat dari issue pokok tentang pemihakan pemerintah terhadap masyarakat, yang mana wacana ini melibatkan beberapa agen-agen sosial sebagai pelaksana, pengendali dan pengambil manfaat.
2. Pesan-pesan yang diwacanakan oleh Kompasiana melahirkan perdebatan dan pro dan kontra dalam *public sphere* yang melahirkan gagasan dan penyebarannya menjadi komunitas yang diimajinasikan dalam spectrum politik warga, politik pemerintahan, politik parlemen dan politik ekonomi. Kekuasaan demokrasi adalah mengkalkulasi kekuatan, dan beberapa kelompok yang secara integral pada beberapa teknologi yang memberikan efek bagi demokrasi sebagai suatu serangkaian mekanisme kekuasaan. Dalam relasi interubjeknya pengambil keputusannya adalah presiden sebagai posisi sosial-politik-ekonomi yang sentral dibandingkan dengan para pembantunya.

B. Saran

Dalam penelitian ini memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini menempatkan media sosial sebagai objek, sedangkan wacana ditempatkan sebagai subjek yang diteliti. Penelitian ini memberikan kontribusi pada mata kuliah kajian media yang fokus

pengembangannya pada implementasi *critical discourse analysis* dalam rangka memperoleh ilustrasi, interpretasi dan intersubjek sociocultural dalam *public sphere*;

2. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan penafsiran dan membutuhkan kritik dan saran melalui penelitian dengan basis teoritik lain, sehingga akan melengkapi dan memperbaiki hasil penelitian ini dan diharapkan menjadi *roadmap* penelitian yang berkelanjutan dalam konteks kajian media.



DAFTAR PUSTAKA

- Albarran, Alan B. 1996. *Media Economics*. Iowa: Iowa State University Press.
- Allan, Stuart and Thorsen, Einar (ed.). 2009. *Citizen Journalism. A Global Perspectives*, New York: Peter Lang.
- Aranguren, J.L. 1967. *Human Communication*. New York: McGraw Hill Book Co.
- Atton, Chris. 2009. *Alternative and Citizen Journalism* dalam Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch (ed.). *The Handbook of Journalism Studies*. New York: Routledge.
- Bagus, Lorens., 2002. *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Banda, Fackson. 2010. *Citizen Journalism & Democracy in Africa*. South Africa: Highway Africa.
- Barna, Katherine. 2009. *Citizen Participation and Online Media: Crossroads of Technology and News*. Departement of Political Science, Central European University di Budapest, Hungaria.
- Bell, David. 2007. *Cyberculture Theorists, Manuel Castells and Donna Haraway*. London and New York: Routledge.
- Bell, David. 2001. *An Introduction to Cybercultures*. London and New York: Routledge.
- Bourdieu, Pierre., 1990. *In Other Words: Essays Towards a Reflective Sociology*, Stanford: Stanford University Press.
- _____, 1984, 1991. *Language and Symbolic Power*, terj. Gino Raymond and Matthew Adamson, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Bruns, Axel. 2010b. *From Reader to Writer: Citizen Journalism as News Prodisage dalam Jeremy Hunsinger, Lisbeth Klastrup, and Matthew Allen, Internet Research Handbook, Dordrecht. NL: Springer. hal. 119-134.*
- Bruns, Axel. 2009a. *Citizen Journalism and Everyday Life: A Case Study of Germany's myHeimat.de dalam Bob Franklin and Matt Carlson, Journalists, Sources, and Credibility: New Perspectives. London: Routledge.*
- Bruns, Axel. Wilson, Jason and Saunders, Barry. 2009b. *Citizen Journalism as Social Networking: Reporting the 2007 Australian Federal Election* dalam Stuart Allan

- & Einar Thorsen (ed.). *Citizen Journalism: Global Perspectives*. New York: Peter Lang.
- Bruns, Axel. 2008a. *News Blogs and Citizen Journalism* dalam Kiran Prasad (ed.). *e-Journalism: New Directions in Electronic News Media*. New Delhi: BR Publishing.
- Bruns, Axel. 2008b. *Gatewatching, Gatecrashing: Futures for Tactical News Media dalam Megan Boler (ed.), Digital Media and Democracy: Tactics in Hard Times*. Cambridge, Mass.: MIT P.
- Bruns, Axel, Wilson, Jason A. & Saunders, Barry J. 2008c. *Building Spaces for Hyperlocal Citizen Journalism, prosiding seminar Association of Internet Researchers 2008 : Internet Research 9.0: Rethinking Community, Rethinking Place*, October 15, 2008 – October 18, 2008, Copenhagen, Denmark.
- Bruns, Axel. 2005. *Gatewatching: Collaborative Online News Production*. New York: Peter Lang.
- Castells, Manuel. 1996. *The Information Age: Economy, Society & Culture, Vol.1: The Rise of The Network Society*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Castells, Manuel. 1997. *The Information Age: Economy, Society & Culture, Vol.2: The Power of Identity*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Castells, Manuel. 1998. *The Information Age: Economy, Society & Culture, Vol.3: The End of the Millennium*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Castells, Manuel. 2000. "Materials for an Exploratory Theory of the Network Society". *British Journal of Sociology* 51(1): 5 – 24.
- Castells, Manuel. 2001. *The Internet Galaxy*. Oxford: Oxford University Press.
- Castell, Manuel. 2010. *Information Age; Economy, Society, and Culture*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
- Catt, Hellena.,1999. *Democracy in Practice*. New York: Roltledge.
- D. Held., 1987. *Models of Democracy*, Cambridge: Polity Press.
- Deuze, Mark. 2009. *The Future of Citizen Journalism* dalam Allan, Stuart and Thorsen, Einar (eds.). *Citizen Journalism, A Global Perspectives*. New York: Peter Lang.
- Deuze, Mark and Bruns, Axel and Neuberger, Christoph. 2007. "Preparing for an Age of Participatory News" dalam jurnal *Journalism Practice* 1(3), hal. 322-338.

- Dyer-Witford, Nick. 2010. "Digital Labour, Species-Becoming and the Global Worker", dalam *Jurnal Ephemera*, Vol. 10, No. 3/4, hal. 484-503.
- Fiske, J., 1989. *Understanding Popular Culture*. London: Unwin Hyman.
- Fairclough, Norman., 2001, *Language and Power*, England: Pearson Education Limited.
- _____, 1992, Introduction. Dalam Fairclough, *Critical Language Awareness*, New York: Longman
- _____, 1995a. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, London: Longman
- _____, 1995b. *Media Discourse*, London: Edward Arnold.
- Flew, Terry and Wilson, Jason A. 2008. "Citizen journalism and Political Participation : the Youdecide Project and the 2007 Australian Federal Election", dalam *Australian Journal of Communication*, 35(2)., hal. 17-39.
- Friedland, Lewis and Nakho Kim. 2009. *Citizen Journalis* dalam Christopher H. Sterling (ed.), *Encyclopedia of Journalism*. California: Sage Publications, Inc.
- Hakken, David. 1999. *Cyborgs@Cyberspace*. New York-London: Oxford.
- Hall, Stuart and Thorsen, Einar (eds.). 2009. *Citizen Journalism, Global Perspectives*. Mew York: Peter Lang.
- Hesmondhalgh, David. 2010. "User-generated Content, Free Labour and the Cultural Industries", dalam *Jurnal Ephemera*, Vol. 10, No. 3/4, hal. 267-284.
- Hicks, Jesse. *Probing Question: What is Citizen Journalism?* dipublikasikan pada 13 Oktober 2009 <<http://live.psu.edu/story/42186>> (diakses pada 10 Juni 2011).
- Levy, P. 2001. *Cyberculture*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- McQuail, Denis. 1987. *Mass Communication Theory: An Introduction*. Beverly Hills: Sage Publication.
- McQuail, Denis. 2011. *Komunikasi Massa*. terj.Putri Iva Izzati. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Miller, Vincent. 2010. *New Media, Networking and Phatic Culture*, dalam Nayar, Pramond K (.ed), *The New Media and Cybercultures Anthology*. Oxford: Willey-Blackwell. hal.534-543.

Mosco, Vincent. 1996. *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication.

Nayar, Pramod K. 2010. *The New Media and Cybercultures Anthology*. Oxford: Wiley-Blackwell.

Radway, J., 1988. *Reading the Romance: Women Patriarchy, and Popular Literature*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

Rosenberry, Jack and St. John III, Burton (eds.). 2010. *Public Journalism 2.0, The Promise and Realty of a Citizen-engaged Press*. New York: Routledge .

Smythe, Dallas W. 2006. *On the Audience Commodity and its Work* dalam Durham and Kellner (.eds), *Media and Cultural Studies*. Malden, MA:Blackwell Publishing .

Van Dijk, Jan. 2006. *The Network Society: Social Aspects of New Media*. London: Sage.

Gandy Jr. Oscar H., 1992. *The Political Economy Approach: A Critical Challenge*, An Elgar Reference Collection.

Saukko, Paula., *Doing Research in Culture Studies: An Introduction to Classical and New Methodological Approaches*, London: SAGE Publication.

Fairclough, Norman., 2001. *Language and Power*, England: Pearson Education Limited.

_____, 1992, Introduction. Dalam Fairclough, *Critical Language Awareness*, New York: Longman

Gans, Herbert J., 1974, *Popular Culture and High Culture: An Analysis and Evaluation of Taste*, New York: Basic Books, Inc.

Guy Ben-Porat, 2008. *Globalization, Secularization and Relegion- Changing Terrain?*, European University Institute, 2008.

Hellen & Catt, 1999. *Democraci in Practice*, London: Routledge, 1999.

Hardiman., Budi F. 2009. *Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.

Hammer, Ronda & Kellner, Douglas., 2009. *Media/Cultural Studes: Critical Approaches*, New York: Peter Lang Publishing.

Kasiyan, 2008. *Manipulasi dan Dehumanisasi Perempuan dalam Iklan*, Yogyakarta:Ombak.

Masduki, 2007. *Reglasi Penyiaran: Dari Otoriter Ke Liberal*, Jogjakarta: LkiS.

Miller, D.1991. *Liberty*, Oxford: Oxford University Press.

Nugroho, Heru., 2004. *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Pateda, Mansur.,2001. *Semantik Leksikal*, Jakarta: Renika Cipta.

Rose, Nikolas. 1999. *The Powers of Freedom*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sandel, Michael, ed., 1984.*Liberalism and Its Critics*, New York:New York University Press.

Sardar, Ziauddin. 2008. *Membongkar Kuasa Media*, Yogyakarta:Reists Book.

Sobur, Alex. 2001. *Analisi Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Rosda Karya Remaja.

Storey, John., Cultural Studies and The Study of Popular : Theories and Methodes, terj. Laily Rahmawati, 2007. *Pengantar Komprehensif Teori dan Metode: Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*, Yogyakarta: Jalasutra.

Tong, Rosemarie, 2009. *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Charlote: Westview Press.

Willis, P., 1977., *Learning to Labour: How Working Class kids get working classjobs*. Wesrmed: Saxon House.

IAIN PURWOKERTO